

**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS  
SARANA PRASARANA PENDIDIKAN  
DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

**TESIS**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**UMMUL CHUSNAH**  
L4D006096



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Juni 2008

**UMMUL CHUSNAH**  
NIM L4D006096

**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

UMMUL CHUSNAH  
L4D006096

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 11 Juni 2008

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juni 2008

Pembimbing Pendamping

Ir. Retno Susanti, MT.

Pembimbing Utama

Ir. Parfi Khadiyanto, M.SL.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.

Allah memiliki rahmat yang diberikan kepada orang yang telah merasa putus asa kepada-Nya. Rahmat itu akan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kepada-Nya ada harapan untuk mendekatkan jalan keluar dan memudahkan urusan (Dr. Aidh Alqorny, 2003).

When God showers mercy upon the people, none can stop it; and if He withholds it, who can release it? He is the almighty, the wise (Al Fathir: 2)

God suffices us, and He is the best protector (Ali Imran: 173).

*This Thesis is dedicated to :  
My beloved husband who had taken over my daily jobs when I went  
for studying;  
My wonderful sons who always asked me when I would graduate;  
My respectful Mommy who always prays for me;  
My late Daddy whom I always miss.*

## ABSTRAK

Salah satu komponen yang harus dikelola dengan baik dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Karena hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik. Demikian halnya yang semestinya terjadi di SMA Negeri 1 Surakarta. Sebagai sekolah yang ditunjuk Departemen Pendidikan Nasional sebagai sekolah bertaraf internasional, maka diperlukan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam program tersebut sangat dibutuhkan. Maka timbul suatu pertanyaan: bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Adapun sasarnya adalah: mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta, mengidentifikasi sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta, mengidentifikasi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta, menganalisis pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dan mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis distribusi frekuensi. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta, mengidentifikasi sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta, mengidentifikasi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta. Untuk menganalisis pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta menggunakan analisis kualitatif dan analisis distribusi frekuensi. Untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta menggunakan analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis distribusi frekuensi.

Dari hasil analisis diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang menonjol adalah dengan menyampaikan usulan dan gagasan. Adapun tingkat partisipasi yang mengacu pada tipologi Arnstein termasuk dalam kategori *placation*. Dalam tangga kelima ini, masyarakat telah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Adapun data responden adalah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 40-50 tahun, berpendidikan sarjana strata 2, memiliki pekerjaan sebagai guru/dosen dan wiraswasta serta berpenghasilan cukup tinggi.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Sarana Prasarana Pendidikan

## **ABSTRACT**

*The relationship management between school and society is one of components to be managed well in School Based Management because the relationship plays an important role in developing and improving the personality of the students. When the relationship between school and society goes well, the responsibility and the participation of the society in developing school runs well either. The same goes for SMA 1 Surakarta. As an international standard school, educational infrastructures quality improvement program is needed to adjust with international standards. Accordingly citizen participation in the program is in great demand, then it causes a question: how is the citizen participation in performing educational infrastructures quality improvement program in SMA 1 Surakarta.*

*The aim of the research is to evaluate citizen participation in performing educational infrastructure quality improvement program in SMA 1 Surakarta. And the targets are: indentifying the programs performed in SMA 1 Surakarta, identifying educational infrastructures in SMA 1 Surakarta, identifying citizen participation in SMA 1 Surakarta, analyzing the implementation of educational infrastructures quality improvement program in SMA 1 Surakarta, and evaluating the citizen participation in performing educational infrastructures quality improvement program in SMA 1 Surakarta.*

*The methods used in analyzing the research are qualitative analysis, quantitative analysis and frequency distribution analysis. Qualitative analysis is used to identify the programs performed in SMA 1 Surakarta, identify the educational infrastructures in SMA 1 Surakarta, and identify the citizen participation in SMA 1 Surakarta. To analyze the implementation of educational infrastructures quality improvement program in SMA 1 Surakarta is used quantitative analysis and frequency distribution analysis. To evaluate the citizen participation in performing educational infrastructures quality improvement program in SMA 1 Surakarta is used qualitative analysis, quantitative analysis and frequency distribution analysis.*

*The results of the analysis is the outstanding form of citizen participation is expressing advice and suggestion. And the rung of participation referring to Arnstein tipology is in placation category. In this fifth ladder, placation means that the society already has the influence although in some ways are still made by powerholders to judge the legitimacy of the advice. The data of the respondents are mostly male, 40-50 years old, postgraduates, teacher/lecture as well as enteprenuer and well-earned.*

**Key Words :** *Citizen Participation, Educational Infrastructures*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta yang menggenggam segala makhluk dalam kuasa-Nya dan yang Maha Berkehendak Atas kehendakNya adalah akhirnya Tesis dengan judul Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk melengkapi kewajiban dalam menempuh tugas belajar pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis mengambil topik tesis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagai sekolah yang dianggap 'favorit' oleh masyarakat di Kota Surakarta, keberhasilan SMA Negeri 1 Surakarta tentu tidaklah terlepas dari adanya partisipasi masyarakatnya, dalam hal ini partisipasi terhadap program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

Penyusunan Tesis ini tentu tidak akan lancar bila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL selaku Pembimbing Utama dan Ir. Retno Susanti, MT selaku Pembimbing Pendamping atas ketulusan dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyusun tesis ini;
2. Suami tercinta dan anak-anak terkasih yang dengan setia menanti penulis menyelesaikan tugas belajar ini;
3. Teman-teman Kelas Diknas Angkatan I yang telah memberikan banyak dorongan bagi penulis;
4. Para staf pengajar dan staf pengelola di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan tugas belajar ini;
5. Rekan-rekan kerja di Subdin Sekolah Menengah Dinas Dikpora Kota Surakarta yang dengan penuh pengertian dan kesabaran telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal baik budi yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini dapat menjadi bermanfaat dan berguna. Amin.

Semarang, 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Sasaran Penelitian.....	8
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4.1. Ruang Lingkup Substansi.....	9
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data.....	12
1.5.1.1. Metode Pengumpulan Data.....	12
1.5.1.2. Teknik Pengolahan Data.....	14
1.5.2. Teknik Penyajian Data.....	15
1.5.3. Sumber Data.....	16
1.5.4. Teknik Analisis.....	18
1.6. Kerangka Pemikiran.....	22
1.7. Sistematika Penulisan Pratesis.....	23

### **BAB II TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT, SEKOLAH NASIONAL BERTARAF INTERNASIONAL, SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN MANEJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

2.1. Partisipasi Masyarakat.....	25
2.1.1. Pengertian Partisipasi.....	25
2.1.2. Pengertian Masyarakat.....	27
2.1.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.....	27
2.1.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	31



2.1.5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	32
2.1.6.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	38
2.2.	Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI).....	40
2.2.1.	Latar Belakang SNBI.....	40
2.2.2.	Tujuan SNBI.....	41
2.2.3.	Sosialisasi Program SNBI.....	43
2.2.4.	Komponen-Komponen SNBI.....	44
2.3.	Sarana Prasarana Pendidikan.....	48
2.4.	Manajemen Berbasis Sekolah.. ..	49
2.5.	Rangkuman Kajian Literatur.....	53

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

3.1.	Gambaran Umum Kota Surakarta.....	62
3.2.	Kondisi Pendidikan di Kota Surakarta.....	65
3.2.1.	Profil Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Surakarta.....	67
3.3.	Profil SMA Negeri 1 Surakarta.....	70
3.3.1.	Deskripsi Sekolah.....	70
3.3.2.	Visi Sekolah.... ..	70
3.3.3.	Misi Sekolah.....	73
3.3.4.	Rekapitulasi Jumlah Nilai Rata-Rata UAN.....	74
3.3.5.	Daftar Prestasi Sekolah.....	74
3.3.6.	Program Kerja Sekolah.....	77

### **BAB IV EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

4.1.	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan.....	82
4.2.	Kesiapan Sarana Prasarana Pendidikan dalam Mendukung SNBI.....	84
4.3.	Analisis Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan.....	88
4.4.	Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	92
4.4.1.	Analisis Tahap Awal Kegiatan.....	92
4.4.2.	Analisis Tahap Pelaksanaan.....	94
4.4.3.	Rangkuman Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	97
4.5.	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	98
4.5.1.	Analisis Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan....	99
4.5.2.	Analisis Tingkat Keaktifan dalam Berdiskusi....	102
4.5.3.	Analisis Keaktifan dalam Kegiatan Fisik.....	105

4.5.4.	Analisis Kesiediaan Membayar.....	107
4.5.5.	Rangkuman Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	110
4.6.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	112
4.7.	Analisis Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan.....	115
4.8.	Rangkuman Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan.....	119
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan.....	121
5.2.	Rekomendasi.....	126

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I.1.</b>	: Tabel Responden dan Jumlah Responden.....	18
<b>TABEL I.2.</b>	: Tabel Skor Partisipasi.....	20
<b>TABEL II.1.</b>	: Rangkuman Kajian Literatur.....	54
<b>TABEL III.1.</b>	: Daftar Nama SMA di Kota Surakarta.....	67
<b>TABEL III.2.</b>	: Tabel Perolehan Nilai Ujian Tahun 2005-2007.....	74
<b>TABEL III.3.</b>	: Tabel Daftar Prestasi SMA Negeri 1.....	75
<b>TABEL III.4.</b>	: Program Kerja SMA Negeri 1 Surakarta 2005-2007.....	77
<b>TABEL IV.1.</b>	: Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan.....	85
<b>TABEL IV.2.</b>	: Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan.....	90
<b>TABEL IV.3.</b>	: Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Awal Kegiatan.....	93
<b>TABEL IV.4.</b>	: Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	96
<b>TABEL IV.5.</b>	: Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	98
<b>TABEL IV.6.</b>	: Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan.....	100
<b>TABEL IV.7.</b>	: Jumlah Skor Tingkat Partisipasi.....	101
<b>TABEL IV.8.</b>	: Tingkat Keaktifan dalam Berdiskusi dan Mengemukakan Pendapat.....	103
<b>TABEL IV.9.</b>	: Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Fisik.....	106
<b>TABEL IV.10.</b>	: Tingkat Kesiediaan untuk Membayar.....	108
<b>TABEL IV.11.</b>	: Tingkat Partisipasi Masyarakat secara Keseluruhan.....	110
<b>TABEL IV.12.</b>	: Tabel Skor Partisipasi.....	111
<b>TABEL IV.13.</b>	: Distribusi Frekuensi Faktor-Faktor Internal.....	113
<b>TABEL IV.14.</b>	: Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.....	118

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1.</b>	: Peta Administrasi Kota Surakarta.....	11
<b>GAMBAR 1.2.</b>	: Kerangka Analisis Penelitian.....	21
<b>GAMBAR 1.3.</b>	: Kerangka Pemikiran.....	22
<b>GAMBAR 2.1.</b>	: Hubungan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.....	31
<b>GAMBAR 2.2.</b>	: Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	37
<b>GAMBAR 3.1.</b>	: Peta Lokasi SMA Negeri 1 Surakarta.....	63
<b>GAMBAR 3.2.</b>	: Persentase Penggunaan Tanah di Kota Surakarta.....	64
<b>GAMBAR 3.3.</b>	: Peta Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun.....	66
<b>GAMBAR 3.4.</b>	: Peta Sebaran SMA di Kota Surakarta.....	69
<b>GAMBAR 3.5.</b>	: Gedung SMA Negeri 1 Surakarta.....	71
<b>GAMBAR 3.6.</b>	: Ruang Kelas SMA Negeri 1 Surakarta.....	73
<b>GAMBAR 3.7.</b>	: Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Surakarta.....	75
<b>GAMBAR 3.8.</b>	: Denah Ruang SMA Negeri 1 Surakarta.....	76
<b>GAMBAR 4.1.</b>	: Diagram Bentuk Partisipasi pada Tahap Awal Kegiatan....	94
<b>GAMBAR 4.2.</b>	: Diagram Bentuk Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang demikian pesat di era global ini.

Hasil dari penelitian pengendalian mutu pendidikan menyatakan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Memang secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata (Sukmadinata dkk, 2006: 3). Hal ini menjadikan bangsa Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional yang bertugas untuk mengakreditasi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dalam konteks persekolahan terdapat dua klasifikasi utama, yaitu sekolah nasional dan sekolah asing. Sekolah nasional terdiri dari sekolah swasta dan sekolah negeri. Sekolah tersebut secara kualitas, sebagai hasil dari akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional, dibagi menjadi tiga yaitu sekolah standar, sekolah mandiri dan sekolah berstandar internasional. Sekolah standar adalah sekolah yang memiliki nilai B dan C, sedangkan sekolah mandiri adalah sekolah yang memiliki nilai A.

Adapun kelompok sekolah ketiga, yaitu sekolah berstandar internasional adalah sebuah sekolah nasional kelompok mandiri yang menjalani sebuah proses peningkatan kualitas sekolah yang berkesinambungan sehingga nantinya mempunyai standar internasional (Samtono, 2006). Ada beberapa komponen yang harus ditingkatkan oleh sekolah nasional agar kualitas komponen-komponen tersebut diakui secara internasional. Komponen-komponen yang akan ditingkatkan kualitasnya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Konsep MBS digulirkan bersamaan dengan bergulirnya tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan, yaitu pada tahun 1999. Secara konseptual, MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan (A. Malik Fajar dalam Abu-Duhou, 2002: xv).

Selanjutnya menurut Slamet dalam Pelangi Pendidikan (2005: 15), MBS adalah model pengelolaan sekolah yang mendasarkan pada kekhasan, karakteristik, kebolehan, kemampuan, kebutuhan sekolah dan bukannya perintah dari atasan. Dengan batasan ini maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam mengelola sekolah asal tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Tidak ada lagi penekanan pada keseragaman, akan tetapi menjamin adanya keberagaman. Dengan definisi ini, maka sekolah harus diberi otonomi dan keluwesan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya pendidikan di sekolahnya. Mengingat MBS memberikan otonomi lebih besar, maka sekolah harus lebih mandiri. Dengan kemandirian ini, maka sekolah harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya karena ketergantungan terhadap pemerintah mulai berkurang.

Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Karena hal ini sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam PP No 20/2003 yaitu:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi manusia.
2. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
3. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Seiring dengan komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Dalam sistem desentralisasi,



daerah mempunyai otonomi penuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga dengan otonomi tersebut daerah mempunyai peran yang lebih banyak dalam merumuskan, memikirkan dan meningkatkan partisipasi rakyatnya.

Bila otonomi pendidikan dimengerti sebagai proses kemandirian sebuah sekolah (lembaga) dalam mengelola segenap sumber daya yang ada, maka dunia pendidikan harus berjalan sesuai dengan 6 tolok ukur keberhasilan desentralisasi pendidikan, yakni kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas (Zamroni, 2000: 44). Karenanya, untuk menunjang keberhasilan implementasi otonomi pendidikan perlu dialog dengan masyarakat sebagai sumber dan induknya. Dialog dimaksudkan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, serta mencari terobosan-terobosan dan pemikiran baru untuk mengembangkan dunia pendidikan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada kepentingan masyarakat yang kompleks dan terus berubah, karenanya harus dapat menyerap aspirasi anggota masyarakat dan dapat mendayagunakan potensi masyarakat dan daerah.

SMA Negeri 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah tertua di Kota Surakarta. Dari tahun ke tahun sekolah ini mampu meningkatkan mutunya. Keberhasilan ini tentu saja tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan baik yang merupakan masukan instrumental, yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana, sistem

pengelolaan maupun masukan yang berkenaan dengan faktor lingkungan. Dari komponen tersebut sarana pendidikan yang antara lain sarana prasarana fisik sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

Dengan kondisi yang demikian tidaklah salah bila sekolah ini ditunjuk sebagai Sekolah Bertaraf Internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional. Konsekuensi dari penunjukan tersebut adalah segenap warga sekolah harus terus berbenah diri. Pelatihan bahasa Inggris dan *Information and Communication Technology (ICT)* adalah menu pokok guru-guru di sekolah ini, karena guru harus berupaya meningkatkan potensi diri sehingga mampu melayani siswa menjadi fasilitator dengan menggunakan media pembelajaran yang modern. Penerapan manajemen berbasis sekolah dengan kepala sekolah sebagai manager harus mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Orang tua siswa dan pihak-pihak lain termasuk masyarakat merupakan mitra kerja yang harus diajak kerjasama. Kepedulian yang tinggi dari masyarakat menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan SNBI.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian bagaimanakah partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikannya sehingga sekolah ini menjadi Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat di sekolah tersebut dengan cara mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya ada tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam MBS. Salah satu dari ketujuh komponen tersebut adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat.

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dengan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara

sekolah dan masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

SMA Negeri 1 Surakarta merupakan satu-satunya SMA di Kota Surakarta yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai Sekolah Bertaraf Internasional. Konsekuensi dari penunjukan ini adalah diperlukannya program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini tentu saja menuntut adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta ?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang tujuan penelitian dan sasaran dari penelitian ini.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dengan cara mengenali bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut.

### **1.3.2. Sasaran Penelitian**

Sasaran penelitian dilakukan agar tujuan penelitian tersebut di atas dapat terjawab. Adapun sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta.
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.
3. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta.
4. Menganalisis pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.
5. Mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian lebih terfokus, maka perlu dibatasi ke dalam ruang lingkup substansi dan ruang lingkup spasial.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Dalam penelitian ini ruang lingkup materi berfungsi untuk membatasi permasalahan. Adapun materi yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

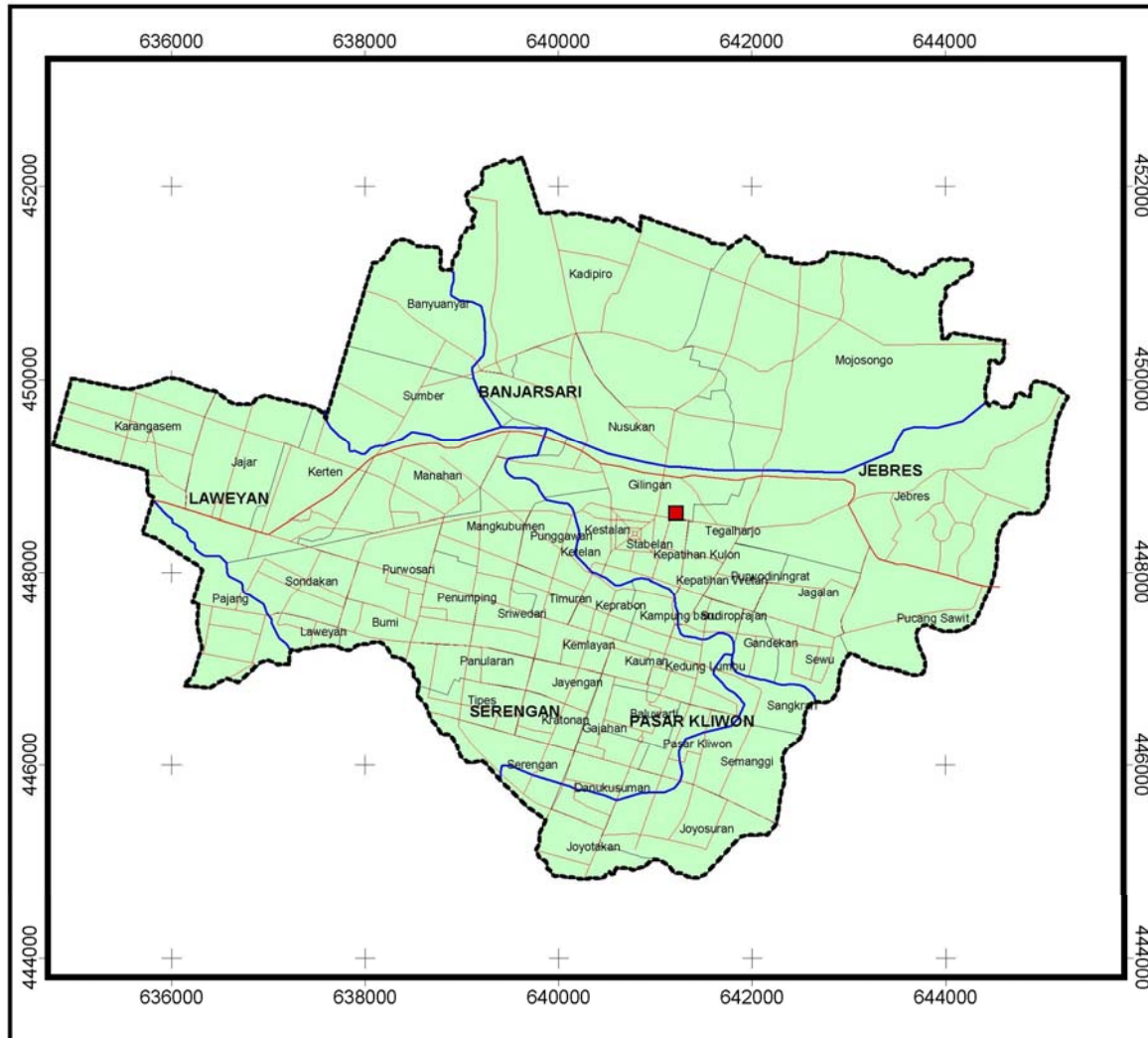
1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.


2. Sarana prasarana pendidikan meliputi ruang kelas, laboratorium komputer dan perpustakaan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta meliputi tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
4. Program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta meliputi Program Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
5. Proses partisipasi masyarakat diawali dari merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan hingga pelaksanaan program.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Kota Surakarta yang berada di Kecamatan Banjarsari.

Dalam penelitian ini responden yang diteliti adalah Komite Sekolah. Adapun jumlah komite tersebut adalah 21 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, semuanya berada di wilayah Kota Surakarta dan tersebar ke semua kecamatan yang ada di Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Banjarsari sebesar 40 %, Kecamatan Pasarkliwon 10 %, Kecamatan Serengan 10 %, Kecamatan Laweyan 40 % dan Kecamatan Jebres sejumlah 10 %.





**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH PERKOTAAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**2007**

---

**PRA TESIS**  
**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**  
**SARANA PRASARANA PENDIDIKAN**  
**DI SMA NEGERI 1 KOTA SURAKARTA**

---

**PETA**  
**LOKASI SMA NEGERI 1**  
**KOTA SURAKARTA**

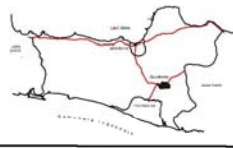
---

**LEGENDA**


- Batas kota
- Batas Kecamatan
- Arteri
- Lokal
- Sungai
- SMA Negeri 1

---

**INSET**

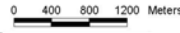


**UTARA**



---

**SKALA**



0 400 800 1200 Meters

---

**SUMBER PETA:**  
**BAPEDA KOTA SURAKARTA**

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk mengkaji partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2005: 234). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999: 63). Selain itu penelitian ini juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Whitney dalam Nazir, 1999: 63-64).

### **1.5.1 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data**

#### **1.5.1.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 'Cara' menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2005: 100). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- Observasi Langsung

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung



adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan secara langsung dapat dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu percobaan, baik di lapangan maupun di dalam laboratorium ( Nazir, 1999: 214).

- Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 1999: 234).

Adapun maksud diadakannya wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002: 135) adalah antara lain untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian.

- Angket / Kuesioner

Menurut Arikunto (2005; 101) pengertian angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis. Dengan demikian daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dimaksudkan untuk memberi respon sesuai dengan permintaan pengguna. Menurut cara memberikan respon, angket dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga responden dapat memberikan isian sesuai

dengan kehendak dan keadaannya (Arikunto, 2005: 103), sedangkan angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai.

- Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1996: 234).

### **1.5.1.2 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data merupakan penyusunan dan perangkaian data yang belum teratur di suatu susunan data yang terinci sesuai dengan peruntukannya, sehingga data dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Teknik pengolahan data meliputi editing, coding dan tabulasi ini.

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis atau meragukan. Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama, sedangkan tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah dikode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang dimaksud adalah pengolahan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui

kuesioner. Dalam proses pengolahan data, jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui bentuk, tingkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dari nilai-nilai yang diperoleh pada tiap pertanyaan, agar dapat dipakai sebagai data yang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel yang berisi data yang telah digolong-golongkan ke dalam kelas-kelas menurut urutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas (Hadi, 2001: 225).

### **1.5.2 Teknik Penyajian Data**

Setelah diolah, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun dalam bentuk narasi yang mampu memberikan informasi yang mudah dipahami. Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dengan tujuan agar mudah dibaca, dipahami dan dianalisis. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisa data. Adapun grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya.

Tabel yang banyak digunakan adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas atau

kategori tertentu. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat ditampilkan dalam bentuk histogram, poligon dan grafik lingkaran.

### **1.5.3 Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulannya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Adapun dalam penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dalam penelitian dokumentasi maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah subyek penelitian atau variabel penelitian.

Dalam mempermudah identifikasi, maka sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- *Person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- *Place* adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam (misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain) dan bergerak (misalnya kegiatan belajar mengajar). Keduanya merupakan obyek untuk penggunaan metode observasi.
- *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini, maka *paper* bukan

terbatas pada kertas tapi dapat berwujud batu, kayu dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Sumber-sumber data yang disebutkan di atas merupakan sumber data dilihat dari subyek dimana data menempel. Adapun sumber data dalam hubungannya dengan sebagian atau seluruhnya sumber data diambil sebagai penelitian maka sumber data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi populasi, sampel dan kasus.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila penelitian ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi. Penelitian populasi ini dapat dilakukan apabila subyeknya tidak terlalu banyak.

Untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta ini, maka digunakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Adapun jumlah komite sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta adalah 21 orang yang terdiri dari:

**TABEL I.1.**  
**JUMLAH RESPONDEN**

No.	Responden	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1
2	Wakil Kepala Sekolah	4
3	Praktisi Pendidikan	1
4	Eksekutif	2
5	Tokoh Masyarakat	1
6	Pengusaha	6
7	Organisasi Profesi	1
8	Wakil Guru	1
9	Alumni	1
10	Orang tua siswa	2
11	Ketua OSIS	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>21</b>

*Sumber: SMA Negeri 1 Surakarta, 2005*

#### **1.5.4 Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif-kualitatif.

a. Metode untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan statistik sederhana dengan menghitung distribusi frekuensinya. Bentuk partisipasi masyarakat diketahui dari persentase bentuk partisipasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta. Untuk menggali lebih dalam tata nilai yang berkembang di masyarakat

berkaitan dengan partisipasinya di SMA Negeri 1 Surakarta, maka hasil dari wawancara akan digunakan.

b. Metode untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maka akan diukur dengan menggunakan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator (1) frekuensi kehadiran dalam pertemuan, (2) keaktifan warga dalam berdiskusi, (3) keterlibatan dalam kegiatan fisik dan (4) kesediaan membayar iuran atau sumbangan. Masing-masing indikator dikaitkan dengan jenjang partisipasi masyarakat yang digunakan oleh Arnstein, yaitu delapan tangga tingkatan partisipasi.

Delapan tangga tersebut diberi skor masing-masing berkisar antara 1-8, sehingga skor minimum bagi setiap individu adalah  $4 \times 1 = 4$ . Adapun skor maksimum bagi setiap individu adalah  $4 \times 8 = 32$ . Bila jumlah populasi adalah 21, maka skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat adalah  $21 \times 4 = 84$  dan skor maksimumnya adalah  $21 \times 32 = 672$ . Setelah skor minimum dan skor maksimum diketahui, maka jarak intervalnya adalah  $(672-84) / 8 = 73,5$

Dengan demikian dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

- *Citizen Control* bila jumlah skornya adalah 599,5 – 672
- *Delegated Power* bila jumlah skornya adalah 526 – 598,5
- *Partnership* bila jumlah skornya adalah 452,5 - 525
- *Placation* bila jumlah skornya adalah 379 – 451,5
- *Consultation* bila jumlah skornya adalah 306,5 - 378
- *Informing* bila jumlah skornya adalah 233 – 304.5

- *Therapy* bila jumlah skornya adalah 158,5 - 231
- *Manipulation* bila jumlah skornya adalah 84 – 157,5

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL I.2.**  
**TABEL SKOR PARTISIPASI**

Jenjang Partisipasi Arnstein		Skor
8	<i>Citizen Control</i>	599,5 – 672
7	<i>Delegated Power</i>	526 – 598,5
6	<i>Partnership</i>	452,5 – 525
5	<i>Placation</i>	379 – 451,5
4	<i>Consultation</i>	306,5 – 378
3	<i>Informing</i>	233 – 304,5
2	<i>Therapy</i>	158,5 – 231
1	<i>Manipulation</i>	84 – 157,5

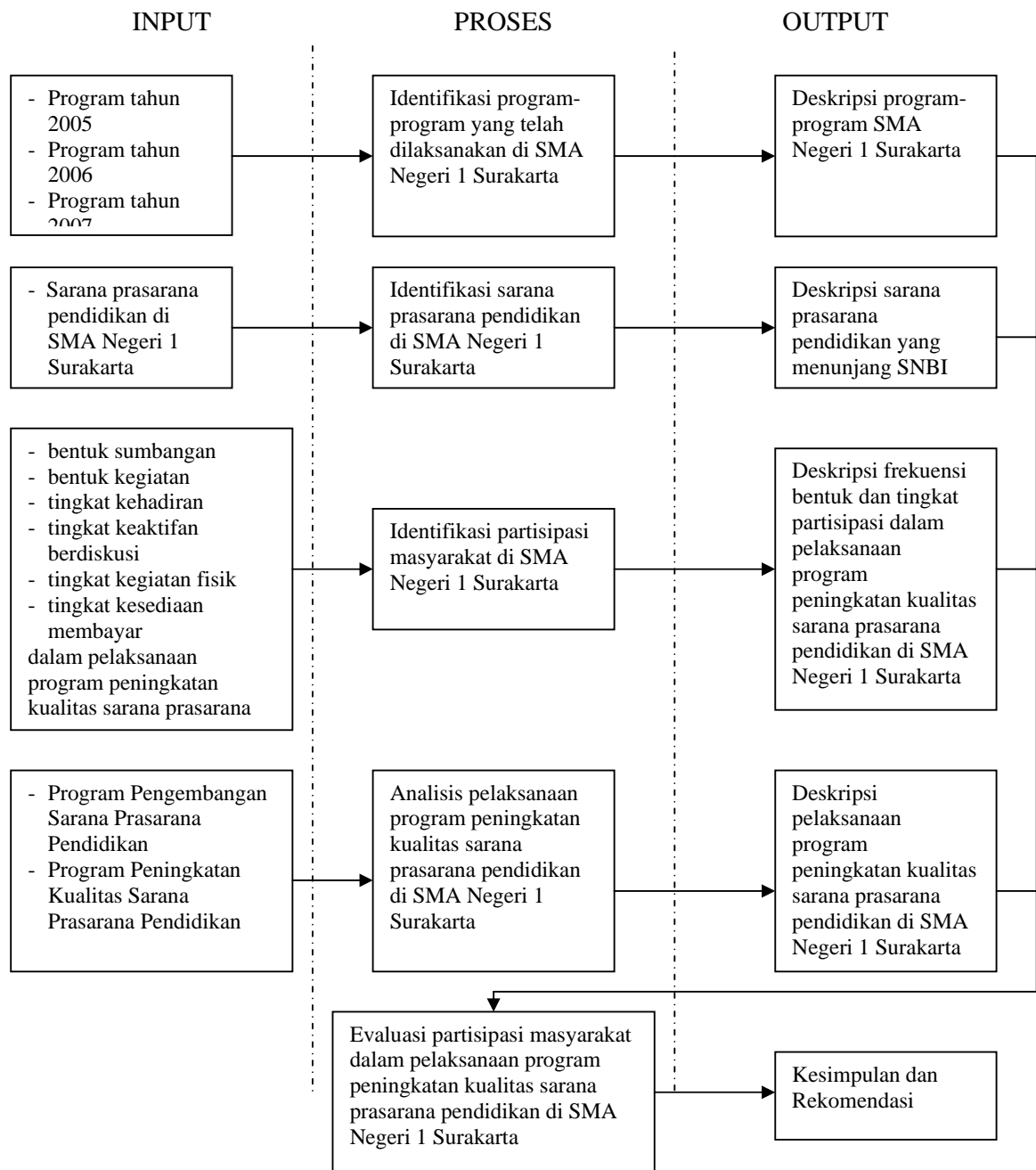
*Sumber: Hasil Analisis, 2008*

- c. Metode untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta

Pada tahap ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi maka akan diketahui persentase faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Adapun kerangka analisis untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 1.1. sebagai berikut:

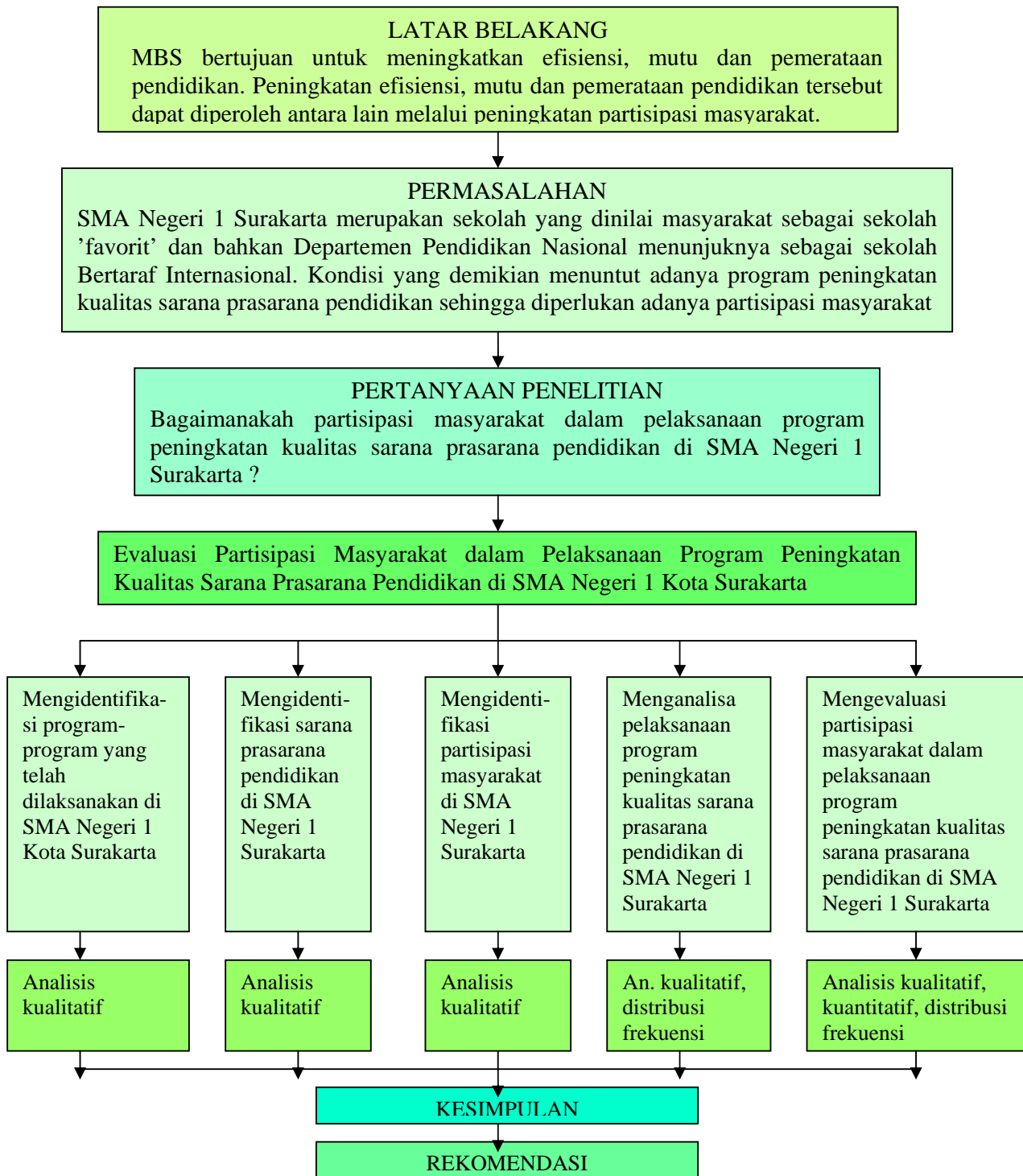




Sumber: Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 1.2.**  
**KERANGKA ANALISIS PENELITIAN**

## 1.6 Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 1.3.**  
**BAGAN KERANGKA PIKIR**

## **1.7 Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian secara substansi dan spasial, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II            PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SEKOLAH NASIONAL BERTARAF INTERNASIONAL**

Bab ini menguraikan tentang konsep partisipasi masyarakat, konsep sekolah nasional bertaraf internasional, konsep sarana prasarana pendidikan serta konsep Manajemen Berbasis Sekolah sehingga dengan teori ini pertanyaan penelitian dapat terjawab.

### **BAB III            KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini meliputi diskripsi mengenai gambaran umum Kota Surakarta serta tinjauan tentang SMA Negeri 1 Surakarta

### **BAB IV            EVALUASI    PARTISIPASI    MASYARAKAT    DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

## BAB V PENUTUP

Berisi hasil analisis yang diuraikan dalam kesimpulan dan selanjutnya akan diusulkan hasil temuan tersebut ke dalam rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT, SEKOLAH NASIONAL BERTARAF INTERNASIONAL DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SERTA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

#### **2.1. Partisipasi Masyarakat**

Dalam subbab ini akan dijelaskan tentang definisi partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

##### **2.1.1. Pengertian Partisipasi**

Pengertian tentang partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya (Talizuduhu, 1990: 103).

Lebih jauh dijelaskan oleh Keith Davis dalam Sastropetro (1988: 13) bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam

pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan (Alastraire dalam Sastropetro, 1988: 33).

Selanjutnya Korten dalam Khadiyanto (2007: 28-29) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain, Poerbakawatja (1976: 209) memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Lain halnya dengan definisi partisipasi menurut Suherlan dalam Khadiyanto (2007: 29). Menurutnya, partisipasi diartikan sebagai dana yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada proyek-proyek pemerintah. Selain itu, partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi di atas, Khadiyanto (2007: 31) merumuskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak

langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

### **2.1.2. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial (Y.B. Suparlan , 1990: 85). Selain itu, menurut A.W.Wijaya, (1985: 34), masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai identifikasi sendiri yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup di dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara kelompok itu. Sekelompok orang dapat dikatakan masyarakat apabila di dalamnya terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain.

Selain itu, definisi masyarakat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dijabarkan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Adapun istilah masyarakat menurut Purwanto (1987: 188) merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan.

### **2.1.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagaimana

diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (UU No. 20 tahun 2003). Adapun Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (UU No. 20 tahun 2003). Dengan kata lain, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada



pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Kepmen No. 044/U/2002).

Adapun tujuan dari Komite Sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Sekolah berperan sebagai:

- a. *Advisory agency* atau pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. *Supporting agency* atau pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. *Controlling agency* atau pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- d. *Mediator* atau perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyebutkan bahwa keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari:

- a. Unsur masyarakat dapat berasal dari

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan
- Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat dll)
- Tokoh pendidikan
- Yayasan penyelenggaraan pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren)
- Yayasan penyelenggara pendidikan
- Dunia usaha/industri/asosiasi profesi
- Organisasi profesi tenaga kependidikan
- Perwakilan dari komite sekolah yang disepakati

b. Unsur Birokrasi/legislatif

- dinas pendidikan setempat
- unsur legislatif yang membidangi pendidikan

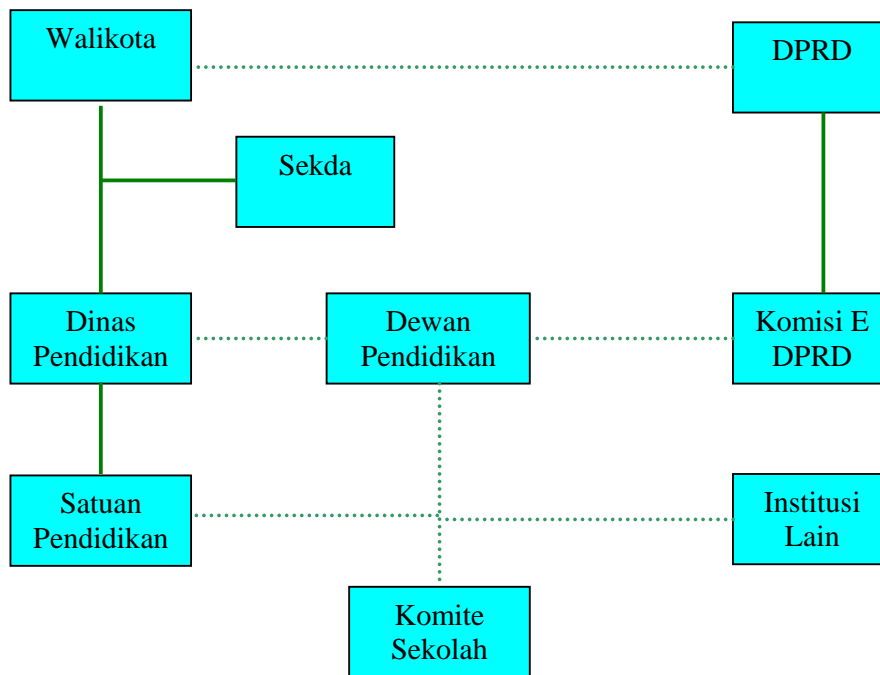
Sementara itu keanggotaan Komite Sekolah adalah

a. Unsur masyarakat dapat berasal dari

- 1). Orang tua/wali peserta didik
- 2). Tokoh masyarakat
- 3). Tokoh pendidikan
- 4). Dunia usaha/dunia industri
- 5). Organisasi profesi tenaga kependidikan
- 6). Wakil alumni
- 7). Wakil peserta didik

b. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa

Gambar 2.1 berikut menampilkan hubungan antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.



Sumber: Kepmen Diknas No. 044/U/2002

Keterangan :

- : Hubungan Instruktif
- ..... : Hubungan Koordinatif

**GAMBAR 2.1.**  
**HUBUNGAN DINAS PENDIDIKAN, DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH DAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### 2.1.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada subbab terdahulu telah diuraikan bahwa pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah dengan memberikan dukungan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas karena tidak hanya berupa pendanaan saja. Hal ini mempertegas pendapat Keith Davis dalam Sastropetro

(1988: 16) bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa (a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, (b) sumbangan spontan berupa uang dan barang, (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (pihak ketiga), (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat, (e) sumbangan dalam bentuk kerja, (f) aksi massa, (g) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa mandiri dan (h) membangun proyek komunitas yang bersifat otonom. Selain itu, Konkon dan Suryatna (1978: 1) memberikan tawaran bahwa partisipasi dapat diwadahi dalam a) buah pikiran, dalam hal ini seperti rapat, diskusi, seminar, pelatihan dan penyuluhan, b) tenaga, seperti gotong royong, c) harta benda dan d) keterampilan.

Adapun bentuk partisipasi yang mungkin dari wadah tersebut menurut Konkon adalah sebagai berikut a) sumbangan tenaga fisik, b) sumbangan finansial, c) sumbangan material, d) sumbangan moral (nasihat, petuah, amanat) dan e) sumbangan keputusan. Selanjutnya, Keith Davis dalam Sastropetro (1988: 16) mengemukakan beberapa jenis partisipasi masyarakat. Menurutnya jenis-jenis partisipasi masyarakat meliputi: (a) pikiran, (b) tenaga, (c) pikiran dan tenaga, (d) keahlian, (e) barang dan (f) uang.

#### **2.1.5. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Dalam makalahnya yang berjudul ” *A Ladder of Citizen Participation*” dalam *Journal of the American Planning Association* (1969), Sherry Arstein

mengemukakan delapan tangga atau tingkatan partisipasi. Kedelapan tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Manipulation*

Dengan mengatasnamakan partisipasi, masyarakat diikutkan sebagai 'stempel karet' dalam badan penasihat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

b) *Therapy*

Pada tingkat *therapy* atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemukan penyebab lukanya.

c) *Informing*

Dengan memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun acapkali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki

kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitaan, pamflet dan poster.

*d) Consultation*

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jejak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat.

Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah merupakan suatu partisipasi palsu. Masyarakat pada dasarnya hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa pulang dan juga dari seberapa banyak kuesioner dijawab. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian pelibatan masyarakat.

*e) Placation*

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat

miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali.

f) *Partnership*

Pada tingkat ini, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan ditentukan dengan melalui mekanisme *take and give*, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. *Partnership* dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir, pemimpinnya bertanggung jawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi, sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.

g) *Delegated Power*

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya tetapi dengan mengadakan proses tawar-menawar.

*h) Citizen Control*

Pada tingkat ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga akan mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

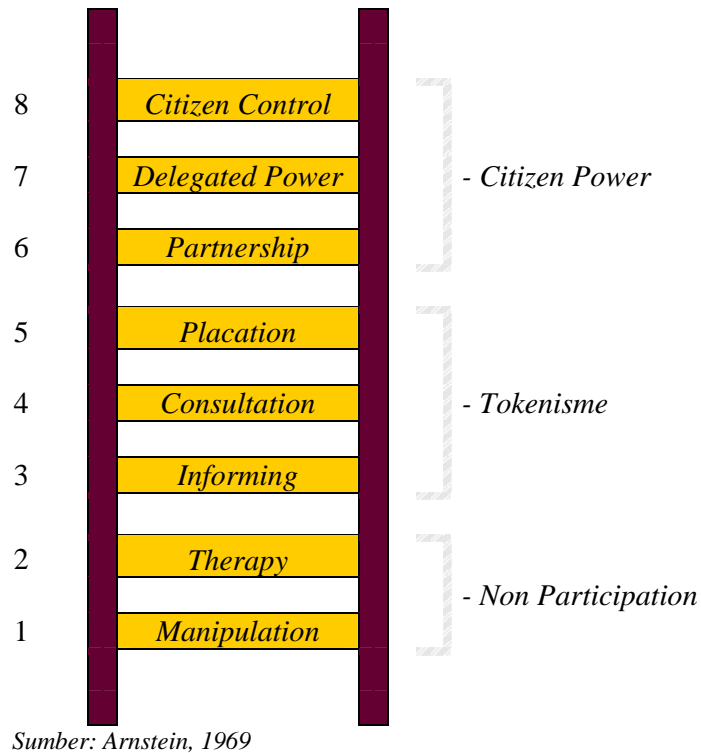
Dari kedelapan tangga tersebut, Arstein mengelompokkannya lagi menjadi tiga tingkat, yaitu:

- a). *Nonparticipation*
- b). *Degree of tokenism* dan
- c). *Degree of Citizen Power*.

Tingkat *nonparticipation* adalah tingkat partisipasi yang bukan dalam arti sesungguhnya. Tingkat ini terdiri dari jenjang terbawah dari tangga tersebut yaitu tingkat pertama (*manipulation*) dan tingkat kedua (*Therapy*). Tingkat *Tokenism*, yaitu tingkat partisipasi yang tidak serius, terdiri tiga jenjang yaitu tingkat ketiga (*informing*), tingkat keempat (*consultation*) dan tingkat kelima (*placation*). Selanjutnya tingkat ke 6 (*partnership*), tingkat ke 7 (*delegated power*) dan tingkat ke 8 (*citizen control*) masuk dalam tingkatan *Degree of Citizen Power*, atau tingkat dimana masyarakat telah memiliki kekuasaan. Secara jelasnya



dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



**GAMBAR 2.2.**  
**DELAPAN TANGGA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pendapat lain diusulkan oleh Club Du Sahel dalam Khadiyanto (2007: 59-61). Menurutnya, terdapat pendekatan-pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat dengan terlebih dahulu mengetahui tingkat partisipasi. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi pasif, Pelatihan dan Informasi

Partisipasi ini merupakan tipe komunikasi satu arah seperti arah antara guru dan muridnya.

b. Sesi Partisipasi Aktif

Partisipasi ini merupakan dialog dan komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas penyuluhan dan pelatihan di luar.

c. Partisipasi dengan keterkaitan

Masyarakat setempat baik pribadi maupun kelompok diberi pilihan untuk bertanggung jawab atas setiap kegiatan masyarakat maupun proyek.

d. Partisipasi atas permintaan setempat

Kegiatan proyek lebih berfokus pada menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar.

Untuk mengukur tingkat partisipasi, Chapin (dalam Slamet, 1993: 82-83) menawarkan dengan cara mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama dengan skalanya. Menurut Chapin skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat partisipasi sosial, yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
- b. Kehadiran dalam pertemuan
- c. Membayar iuran/sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan di dalam kepengurusan

#### **2.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Menurut Slamet (1993: 137-143), faktor-faktor yang mempengaruhi

partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian.

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

b. Usia

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

c. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.

d. Tingkat Penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

e. Mata Pencapaian

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan.

## **2.2. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI)**

### **2.2.1. Latar Belakang SNBI**

Program Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah menuju SNBI pada dasarnya muncul karena beberapa hal (Samtono, 2006). Pertama yang paling mendasar adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi bahwa Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Kedua adalah tuntutan akan adanya angkatan kerja yang dapat berkompetensi di tingkat internasional atau global. Pemerintah merasa perlu untuk memperbaiki kualitas sistem sekolah menengah, baik umum ataupun kejuruan sehingga dapat dihasilkan lulusan yang lebih unggul.

Ketiga adalah keberadaan siswa Indonesia yang belajar ke luar negeri cenderung meningkat jumlahnya. Kebanyakan mereka harus mengikuti program matrikulasi minimal satu tahun sebelum mereka diterima di sebuah perguruan tinggi. Hal ini sudah barang tentu menambah jumlah devisa yang mengalir ke luar

negeri. Dengan adanya sekolah menengah yang diakui secara internasional diharapkan lulusan sekolah tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk mengikuti matrikulasi.

Manajemen Peningkatan Mutu menuju SNBI juga mempunyai dimensi pencegahan erosi identitas nasional. Karena saat ini telah menjadi fenomena munculnya sekolah-sekolah yang mengatasnamakan sekolah yang bertaraf internasional dengan menggunakan kurikulum sekolah asing dan tidak mengikuti ujian nasional. Di samping itu globalisasi bidang pendidikan berimplikasi pada tuntutan peningkatan mutu sekolah di Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah di luar negeri yang membuka cabang atau aviliasinya di Indonesia. Dengan adanya sekolah nasional yang mempunyai taraf internasional kekhawatiran akan terserapnya pangsa pasar sekolah kita akan tereliminasi.

### **2.2.2. Tujuan SNBI**

Sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara berkesinambungan, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan sebuah program yang disebut Program Peningkatan Mutu SMA Menuju Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah (SMA) dan membentuk angkatan kerja yang dapat berkompetisi secara global.

Adapun keluaran yang diharapkan dari program tersebut adalah:

- a. Meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah sebagai warga negara terdidik dengan kualifikasi, keterampilan dan relevansi ke pasar global yang lebih baik.
- b. Terbentuknya sekolah rujukan nasional di setiap propinsi yang dianggap mempunyai potensi dan kesempatan yang besar untuk memperbaiki kualitasnya sehingga memunculkan perbaikan yang sepolo dalam sistem sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sistem pendidikan secara keseluruhan.
- c. Tersusunnya standar kualitas pendidikan internasional yang cocok untuk Indonesia.
- d. Teridentifikasinya pendekatan perbaikan kualitas sekolah yang dapat ditiru.

Hasil langsung yang dapat diharapkan dari program tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Membaiknya pencapaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan sekolah menengah atas sebagai hasil dari adanya perbaikan standar lingkungan belajar, kurikulum dan penilaian belajar, perbaikan kinerja guru dan staf pendukung akan karier, kesiapan kerja dan penempatan.
- b. Membaiknya pembinaan sekolah dan jaminan kualitas secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*) yang ditandai dengan adanya 1) perbaikan dan penyesuaian beberapa sistem manajemen dengan standar yang sudah diakui secara internasional, 2) peningkatan kualitas personil manajemen dan administrasi, 3) peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih luas terhadap kemajuan sekolah, 4) tersedianya strategi pendanaan

yang berkesinambungan dan 4) pelembagaan program-program jaminan kualitas berbasis sekolah.

- c. Meningkatnya kesempatan belajar yang sama bagi siswa yang secara ekonomis dan geografis kurang beruntung tetapi kuat secara akademis dan tersedianya pelayanan khusus bagi siswa yang ditandai dengan berkembangnya transparansi dan persamaan dalam penerimaan siswa baru, tersedianya pelayanan penunjang belajar siswa, tersedianya pelayanan dan fasilitas sosial khusus dan tumbuhnya tanggung jawab komite sekolah.
- d. Tersedianya landasan bagi kebijakan dan strategi pengembangan kualitas sekolah.

### **2.2.3. Sosialisasi Program SNBI**

Sekolah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program SNBI kepada masyarakat secara benar. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa program ini adalah upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah secara berkesinambungan. Sekolah perlu mensosialisasikan dengan jujur dan benar hakikat dari program ini.

Upaya peningkatan mutu sekolah memerlukan dukungan semua pihak dan dana yang besar. Berkenaan dengan hal tersebut program ini menuntut adanya kerjasama dan komitmen antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota, sekolah dan komite sekolah serta *stakeholders* lainnya. Kerjasama dan komitmen ini meliputi segala jenis dukungan, baik yang bersifat material seperti dana pendukung maupun bantuan nonmaterial, seperti pemberian pemikiran.

Pendanaan dari pemerintah akan dititikberatkan pada program-program sekolah yang bersifat inovatif dan nonfisik. Program inovatif merupakan program terobosan untuk lebih mempercepat sekolah menuju SNBI. Program yang bersifat fisik dan memang dibutuhkan oleh sekolah dalam rangka menunjang perintisan menuju SNBI secara finansial harus menjadi tanggung jawab sekolah dan *stakeholders*-nya.

#### **2.2.4. Komponen-Komponen SNBI**

Dalam Bab I telah disebutkan bahwa sekolah berstandar internasional adalah sebuah sekolah nasional kelompok mandiri yang menjalani sebuah proses peningkatan kualitas sekolah yang berkesinambungan sehingga nantinya mempunyai standar internasional (Samtono, 2006). Ada beberapa komponen yang harus ditingkatkan oleh sekolah nasional agar kualitas komponen-komponen tersebut diakui secara internasional. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah sarana prasarana pendidikan yang meliputi:

- 1) Semua sarana dan prasarana menjamin keselamatan kerja
- 2) Ruang Kelas
  - 90 % ruang kelas berukuran lebih dari 63 m<sup>2</sup>
  - Ratio ruang kelas dengan jumlah siswa adalah 1 : 24.
  - Semua kelas atau minimum 1 kelas untuk tiap-tiap tingkat memiliki 1 set perangkat *ICT* ( 1 set PC/laptop, 1 set speaker, 1 LCD, 1 screen projector).



### 3) Perpustakaan

- Luas perpustakaan adalah 0,2 m<sup>2</sup>/siswa untuk sekolah dengan jumlah lebih dari 600 siswa dan dapat menampung 5 % dari siswa terdaftar yang kondusif untuk membaca dan studi individual.
- Memiliki buku teks dalam bentuk cetak atau digital untuk setiap mata pelajaran minimal sama dengan jumlah siswa dalam satu kelas.
- Memiliki buku referensi (5 judul) baik cetak maupun digital sebagai penunjang buku teks untuk setiap mata pelajaran.
- Berlangganan periodikal terpilih, baik cetak maupun digital (jurnal, majalah, buletin, surat kabar dan sebagainya) dalam jumlah memadai untuk peningkatan mutu siswa dan profesionalisme guru dan staf lainnya.
- Menggunakan sistem katalog yang diakui secara internasional dan berbasis komputer.
- Memiliki komputer untuk perpustakaan termasuk untuk multimedia 5 buah.
- Memiliki ruang baca yang memadai.
- Memiliki komputer yang disediakan bagi pemakai perpustakaan untuk mengakses berbagai informasi maupun bahan ajar.

### 4) Laboratorium komputer

- Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan berAC.
- Memiliki jumlah komputer sesuai dengan rata-rata jumlah siswa (maksimum 24 siswa per rombongan belajar).

- Memiliki teknisi dengan jumlah yang memadai untuk membantu pelaksanaan pembelajaran siswa dan perawatan komputer.
  - Memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam laboratorium komputer.
- 5) Kantin
- Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai.
  - Memiliki *furniture* yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.
  - Memiliki lingkungan kantin yang sehat dan bersih.
  - Menyajikan makanan yang sehat, bergizi dan terjangkau bagi warga sekolah.
- 6) Auditorium
- Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan berAC.
  - Memiliki *furniture* dan peralatan yang memadai untuk kegiatan siswa.
  - Memiliki sarana olahraga yang memadai untuk berbagai jenis kegiatan olah raga.
  - Memiliki teknisi dengan jumlah memadai untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan perawatan peralatan olahraga.
  - Memiliki sistem penjaminan keselamatan yang memadai bagi pengguna sarana prasarana olahraga.
- 7) Pusat Belajar dan Riset Guru
- Memiliki ruangan untuk sumber belajar dan riset guru dengan luas yang memadai yang dilengkapi dengan komputer dan jaringan

internet untuk guru dengan ratio 1 : 5.

- Memiliki referensi, baik cetak maupun digital bagi guru sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

8) Penunjang Administrasi Sekolah

- Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai.
- Memiliki *furniture* yang memadai untuk berbagai jenis administrasi.
- Memiliki *server* minimum 2 buah.
- Memiliki komputer dengan jumlah yang memadai untuk berbagai kegiatan administrasi.
- Memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam ruang administrasi.

9) Unit Kesehatan

- Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan berAC.
- Memiliki bahan-bahan dan peralatan dasar untuk P3K.
- Memiliki tenaga profesional yang dapat menangani pelaksanaan P3K.
- Memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam unit kesehatan.

10) Toilet

- Memiliki ruangan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan ukuran yang memadai sesuai dengan jumlah warga sekolah.
- Memiliki sistem sanitasi yang baik dan memadai untuk menjamin kebersihan dan kesehatan.

- Memiliki jumlah air yang memadai untuk mendukung sistem sanitasi.
- Memiliki teknisi dengan jumlah memadai untuk membantu perawatan toilet.

11) Sarana Prasarana Penunjang lainnya

Memiliki sarana prasarana keagamaan, portabel water dan sistem komunikasi.

### **2.3. Sarana Prasarana Pendidikan**

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud dengan sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan bahan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, definisi sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan lembaga dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan dan buku (bahan ajar), bahan habis pakai dan peralatan lainnya. Adapun prasarana adalah

fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan contohnya lahan dan ruangan (Anonim, 2008).

#### **2.4. Manajemen Berbasis Sekolah**

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara leksikal berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau azas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berazaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Sukmadinata, dkk: 2006: 1).

Secara konseptual, Malen dkk dalam Abu Duhou (2002: 16) mendefinisikan MBS sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang.

Definisi yang mencakup makna luas dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohrman dalam Sukmadinata (2006: 2-3). Secara luas MBS berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal sekolah tak lain adalah kepala sekolah,

guru, konselor, pengembang kurikulum, staf administrasi, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan siswa itu sendiri.

Dengan kata lain, Myers dan Stonehill dalam Sukmadinata (2006: 3) mengemukakan bahwa MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. MBS memberi kesempatan kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberi mereka tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personel, kurikulum. Dengan keterlibatan *stakeholders* lokal dan pengambilan keputusan dalam MBS dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa.

Mulyasa (2002: 11) mengungkapkan MBS adalah suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Senada dengan itu, BPPN dan Bank Dunia dalam Mulyasa (2002: 11) memberi pengertian bahwa MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat. Maka MBS mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan

pemerataan pendidikan (Mulyasa, 2002: 25). Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Lain halnya dengan pendapat Slamet dalam *Pelangi Pendidikan* (2005: 15). Menurutnya MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui peningkatan: kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekitarnya, keluwesan-keluwasan pengelolaan sumber daya pendidikan, transparansi, akuntabilitas, kerja sama, kepedulian, tanggung jawab sekolah, pengambilan keputusan sedekat mungkin dengan pihak yang akan terkena dampak keputusan, inovasi dan relevansi pendidikan dengan kondisi lokal dan pendanaan yang dihimpun dari masyarakat lokal.

Penerapan MBS menurut Slamet (2005: 15) dilandasi oleh asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. pembaharuan (reformasi, restrukturisasi, revitalisasi, resistemisasi, rekonfigurasi, inovasi) yang direncanakan dan diimplementasikan secara terpusat sering tidak mampu memperbaiki inti kegiatan sekolah yaitu proses belajar mengajar;

- b. sekolah membutuhkan dukungan sumber daya pendidikan secara tetap dan konsisten, tetapi pemerintah pusat, propinsi dan bahkan kabupaten/kota tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut;
- c. setiap sekolah memiliki kekhasan, keunikan, kebolehan, kemampuan, kebutuhan yang berbeda dan potensinya pun berbeda pula antara satu sekolah dengan sekolah lainnya;
- d. sekolah bukan sekadar subordinasi/pelaksana program-program dari atas, akan tetapi mereka merupakan garda terdepan yang harus diberdayakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan secara mandiri; dan
- e. sistem pendidikan harus akuntabel tidak saja kepada birokrasi dalam sistem pendidikan, akan tetapi justru kepada masyarakat luas yang dilayani (*stakeholders*).

Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka sudah seharusnya pembaharuan dan pengelolaan pendidikan bergeser dari berbasis pemerintah pusat bergerak menuju berbasis sekolah, dimana MBS merupakan salah satunya.

MBS akan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka harus ada manajemen komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik (Mulyasa, 2002: 39). Dari ketujuh komponen tersebut di antaranya adalah:

- a. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan



Manajemen sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

b. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.

#### **2.4. Rangkuman Kajian Literatur**

Dari beberapa uraian di atas, maka disusun kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Rangkuman kajian literatur dimaksud untuk memperoleh variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Berikut adalah rangkuman kajian literatur dimaksud:

**TABEL II. 1**  
**RANGKUMAN KAJIAN LITERATUR**

No.	Komponen	Sumber	Teori	Variabel
1	Partisipasi Masyarakat			
1.1.		Talizuduhu	Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya	Turut serta secara mental maupun emosional
1.2.		Keith Davis	Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan	Keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan di dalam situasi kelompok
1.3.		Alastraire	Partisipasi adalah keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan	Keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya
1.4.		Korten	Partisipasi adalah tindakan yang mendasar untuk bekerja sama yang memerlukan waktu dan usaha agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan	Tindakan untuk bekerja sama
1.5.		Soegarda	Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya	Diikutsertakan dalam perencanaan dan juga memikul tanggung jawab
1.6.		Suherlan	Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan serta memetik manfaatnya
1.7.		Khadiyanto	Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan	Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan,

Lanjut ke halaman 55

Lanjutan Tabel II.1 halaman 54

No.	Komponen	Sumber	Teori	Variabel
			pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program	melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan			
		UU No. 20/2003	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah, yaitu lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.	Komite sekolah adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang ada di tingkat satuan pendidikan.
3.	Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat			
3.1.		Keith Davis	Bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa konsultasi, sumbangan spontan, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi massa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa mandiri dan membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.	Konsultasi, sumbangan berupa uang dan barang, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi masa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga dan membangun proyek masyarakat
3.2.		Konkon dan Suryatna	Bentuk partisipasi adalah sumbangan tenaga fisik, sumbangan finansial, sumbangan material, sumbangan moral, sumbangan keputusan	Sumbangan tenaga fisik, sumbangan finansial, sumbangan material, sumbangan moral, sumbangan keputusan.
4.	Tingkat Partisipasi Masyarakat			
		Sherry Arnstein	Ada delapan tangga partisipasi masyarakat yaitu: <i>manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, citizen control</i>	<i>manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership,</i>

Lanjut ke halaman 56

Lanjutan Tabel II.1 halaman 55

No.	Komponen	Sumber	Teori	Variabel
				<i>Delegated power, citizen control</i>
		Club du Sahel	Tingkatan partisipasi adalah <ul style="list-style-type: none"> <li>- partisipasi pasif, pelatihan dan informasi</li> <li>- sesi partisipasi aktif</li> <li>- partisipasi dengan keterkaitan</li> <li>- partisipasi atas permintaan setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partisipasi pasif, pelatihan dan informasi</li> <li>- sesi partisipasi aktif</li> <li>- partisipasi dengan keterkaitan</li> <li>- partisipasi atas permintaan setempat</li> </ul>
		Chapin	Kriteria tingkat partisipasi sosial: <ul style="list-style-type: none"> <li>- keanggotaan dalam organisasi</li> <li>- kehadiran dalam pertemuan</li> <li>- membayar sumbangan</li> <li>- keanggotaan dalam kepengurusan</li> <li>- kedudukan dalam kepengurusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keanggotaan dalam organisasi</li> <li>- kehadiran dalam pertemuan</li> <li>- membayar sumbangan</li> <li>- keanggotaan dalam kepengurusan</li> <li>- kedudukan dalam kepengurusan</li> </ul>
5.	Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi			
		Y. Slamet	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian	Faktor-faktor internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis kelamin</li> <li>- usia</li> <li>- tingkat pendidikan</li> <li>- tingkat pendapatan</li> <li>- mata pencaharian</li> </ul>
6.	Sarana Prasarana Pendidikan			
		PP 19/2005	Sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan bahan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,	Sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan bahan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

Lanjut ke halaman 57

Lanjutan Tabel II.1 halaman 56

No.	Komponen	Sumber	Teori	Variabel
			<p>ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p>	<p>berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p>
		<p><a href="http://www.lampjabar.go.id">http://www.lampjabar.go.id</a>.</p>	<p>Sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan lembaga dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan dan buku (bahan ajar), bahan habis pakai dan peralatan lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan contohnya lahan dan ruangan</p>	<p>Sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan lembaga dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan dan buku (bahan ajar), bahan habis pakai dan peralatan lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan contohnya lahan dan ruangan</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari rangkuman dalam Tabel II.1 di atas, maka untuk melaksanakan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 adalah dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Bentuk sumbangan dalam berpartisipasi: uang, barang, tenaga, usulan (Konkon dan Suryatna).
2. Bentuk kegiatan dalam berpartisipasi (Keith Davis):
  - Dikerjakan bersama antara sekolah dan Komite Sekolah
  - Dibuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut
  - Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah
  - Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa
  - Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah
3. Tingkat partisipasi: frekuensi kehadiran, keaktifan berdiskusi, keterlibatan fisik dan kesediaan membayar (Chapin). Apabila tingkat ini dikorelasikan dengan tipologi Arnstein, maka akan didapatkan tingkatan sebagai berikut:
  - a. frekuensi kehadiran:
    - hadir karena terpaksa termasuk (*manipulation*);
    - hadir sekedar memenuhi undangan termasuk (*therapy*);
    - hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat (*informing*);
    - hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapatnya tidak diperhitungkan (*consultation*);

- hadir dan memberikan pendapat, namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan (*placation*);
  - hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara (*partnership*);
  - hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan (*delegated power*);
  - hadir dan mampu membuat keputusan (*citizen control*);
- b. keaktifan berdiskusi:
- berdiskusi karena terpaksa (*manipulation*);
  - berdiskusi ala kadarnya (*therapy*);
  - mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi (*informing*);
  - mendapat informasi dan boleh berdiskusi tapi hasil diskusi tidak diperhitungkan (*consultation*);
  - Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan (*placation*);
  - Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara (*partnership*);
  - Aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan membuat keputusan (*delegated power*);
  - Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan (*citizen control*).
- c. Keterlibatan dalam kegiatan fisik:
- terlibat karena dipaksa (*manipulation*);

- terlibat sekedarnya saja (*therapy*);
- terlibat tanpa mendapat kesempatan untuk menyampaikan ide-ide (*informing*);
- terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan (*consultation*);
- terlibat tetapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan (*placation*);
- terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama (*partnership*);
- terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan ide (*delegated power*);
- terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar (*citizen control*).

d. Kesiapan untuk membayar:

- membayar karena terpaksa (*manipulation*);
- membayar sekedarnya saja (*therapy*);
- membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya (*informing*);
- membayar dan berkesempatan menyampaikan ide, tapi ide tidak diperhitungkan (*consultation*);
- membayar dan berkesempatan menyampaikan ide tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan di lapangan (*placation*);
- Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana (*partnership*);



- Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatannya (*delegated power*);
  - Membayar dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar (*citizen control*).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis pekerjaan (Slamet).

## **BAB III**

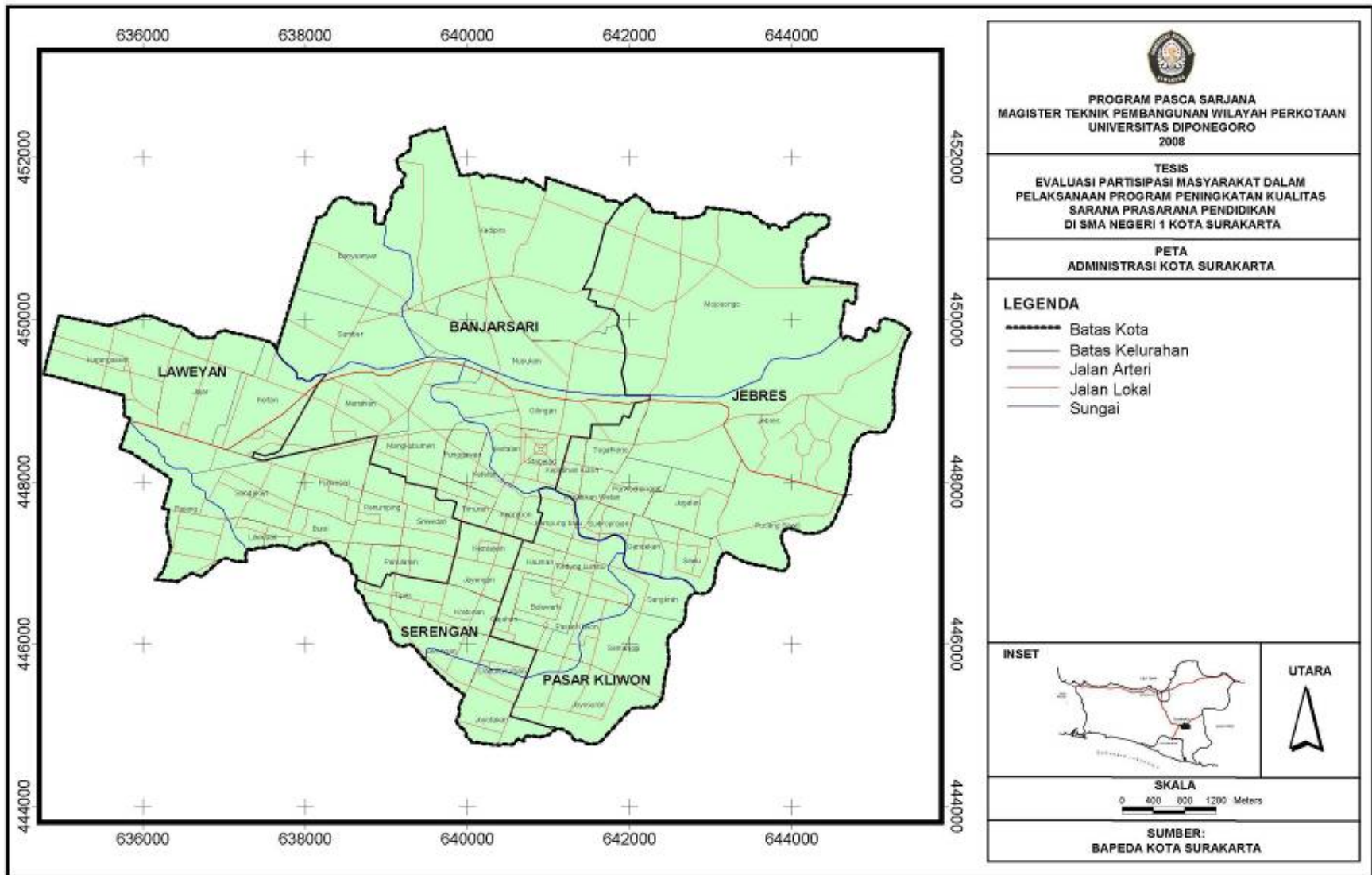
### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Kota Surakarta**

Kota Surakarta merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di antara  $110^{\circ} 45' 15''$  –  $110^{\circ} 45' 35''$  Bujur Timur dan  $70^{\circ} 36'$  –  $70^{\circ} 56''$  Lintang Selatan. Kota ini dibelah oleh tiga buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.

Secara geografis wilayah Kota Surakarta terletak di antara dua buah gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi. Selain itu, kota ini juga terletak di tepi sungai Bengawan Solo. Karena posisi tersebut, maka kota ini memiliki topografi yang relatif rendah dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sedangkan batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo.

Kota Surakarta memiliki luas wilayah sekitar  $44,06 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk mencapai 534.540 jiwa, sedangkan tingkat kepadatannya adalah  $12.716/\text{km}^2$ . Dengan kondisi ini maka Kota Surakarta menjadi salah satu kota besar yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan menjadi kota terbesar kedua setelah Kota Semarang.

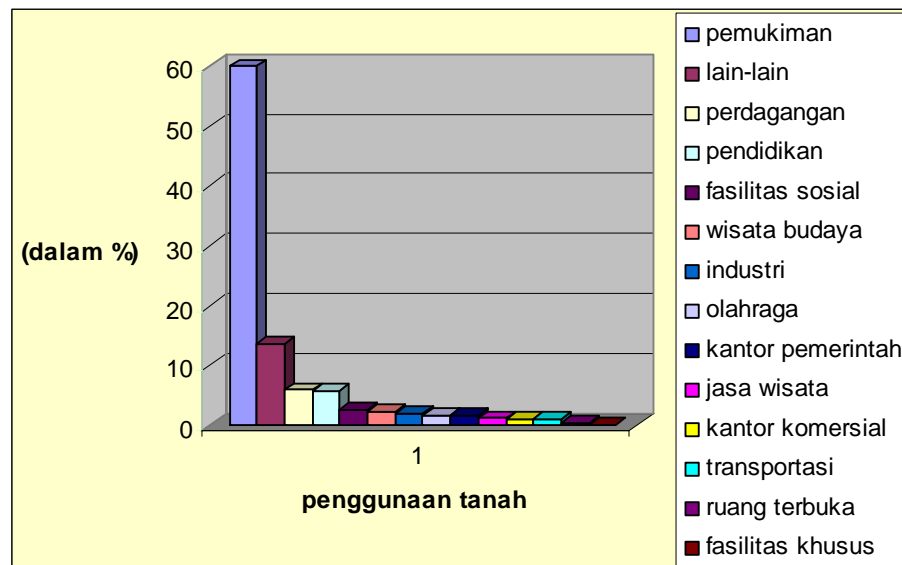








Sebagian besar tanah di Kota Surakarta digunakan sebagai kawasan pemukiman, yaitu mencapai 2,642.44 m<sup>2</sup> (60%), kawasan wisata budaya seluas 99,09 m<sup>2</sup> (2,25 %), kawasan olahraga seluas 79,27 m<sup>2</sup> (1,80 %), jasa wisata seluas 55,05 m<sup>2</sup> (1,25 %) kawasan perdagangan seluas 264,24 m<sup>2</sup> (6%), kawasan perkantoran komersial seluas 44,04 m<sup>2</sup> (1 %), kawasan perkantoran pemerintah seluas 77,07 m<sup>2</sup> (1,75%), kawasan pendidikan seluas 253,23 m<sup>2</sup> (5,75 %), fasilitas sosial seluas 121,11 m<sup>2</sup> (2,75 %), fasilitas transportasi 44,04 m<sup>2</sup> (1%), industri seluas 85,88 m<sup>2</sup> (2%), kawasan ruang terbuka seluas 22,02 m<sup>2</sup> (0,5 %), fasilitas khusus seluas 11,01 m<sup>2</sup> (0,25%), dan lain-lain seluas 605.58 m<sup>2</sup> (13,70%).



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2005

**GAMBAR 3.2**  
**PERSENTASE PENGGUNAAN TANAH DI KOTA SURAKARTA**

### **3.2. Kondisi Pendidikan di Kota Surakarta**

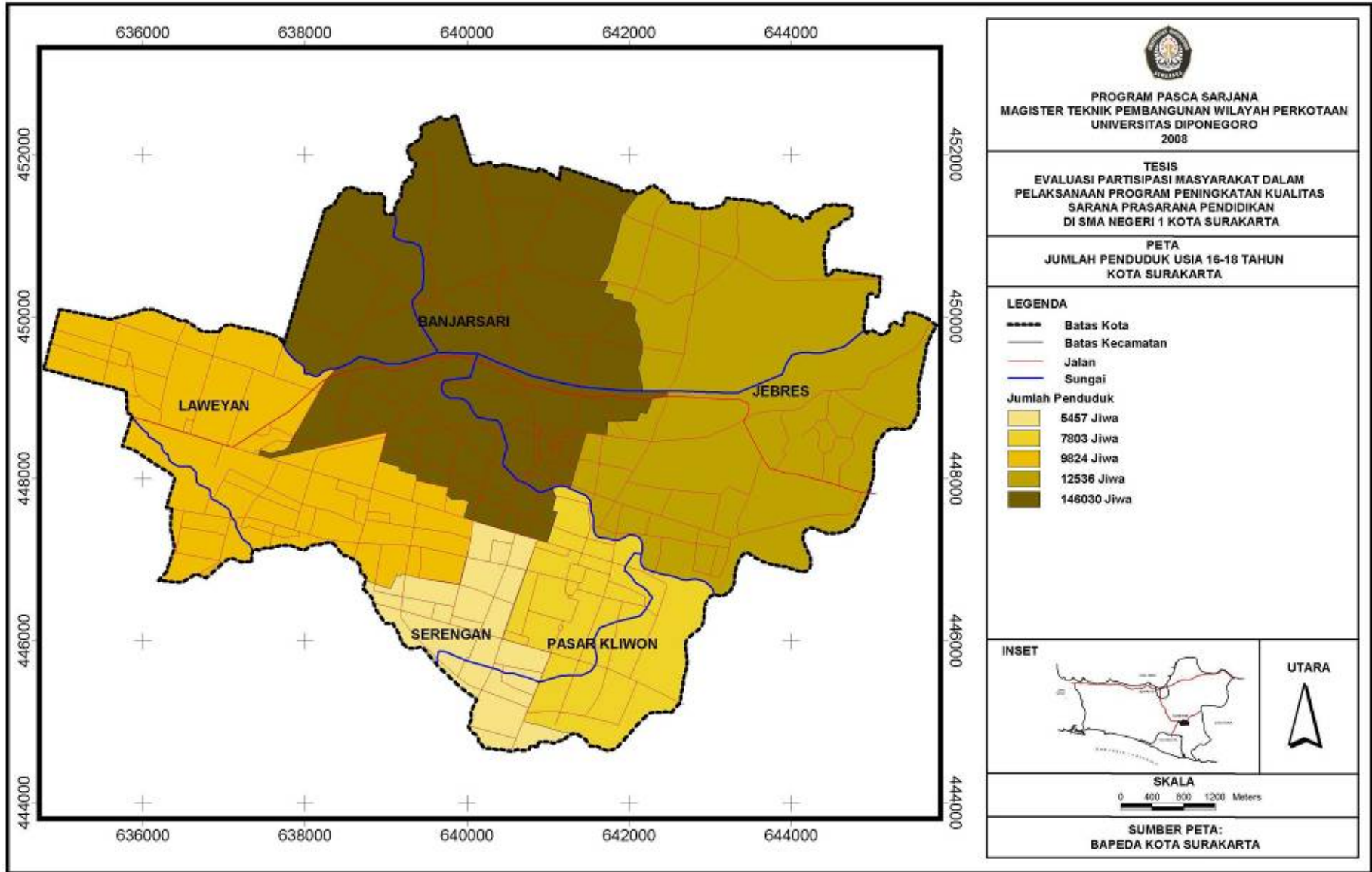
Sejalan dengan visi Kota Surakarta, yaitu terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga, maka sudah barang tentu pendidikan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan di Kota Surakarta.

Dari data Susenas tahun 2005, terdapat sebanyak 1.7 % penduduk usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Sementara itu yang belum pernah sekolah mencapai 0 % dari jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh anak usia sekolah di Kota Surakarta pernah mengenyam bangku sekolah. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan sangat tinggi.

Di Kota Surakarta terdapat 272 buah Sekolah Dasar, 73 Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa sebanyak 33.713 orang, 41 Sekolah Menengah Atas dengan jumlah murid sebanyak 21.199 orang dan 41 Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 21.493 orang.

Sedangkan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang bersekolah adalah sebanyak 54.460 orang, jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 28.556 orang, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 28.556 orang (Kota Surakarta dalam Angka 2005).







### 3.3. Profil Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta

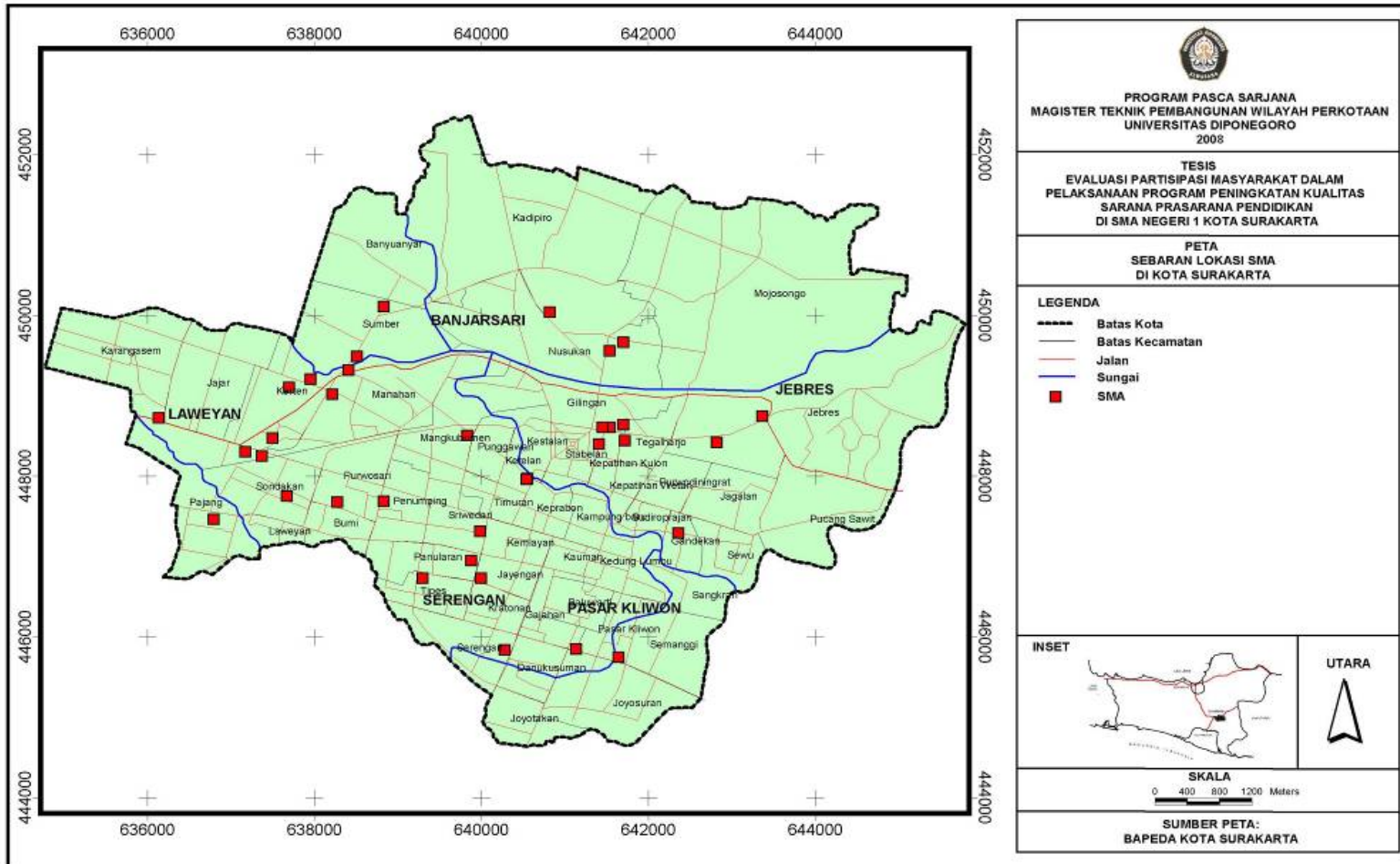
Telah dijelaskan dalam sub bab terdahulu bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Surakarta adalah 41 buah yang tersebar di semua lima kecamatan yang ada di kota ini. Jumlah tersebut terdiri dari 8 sekolah negeri dan sisanya sejumlah 33 merupakan sekolah swasta. Berikut adalah nama-nama SMA yang ada di Kota Surakarta :

**TABEL III.1.**  
**DAFTAR NAMA SMA DI KOTA SURAKARTA**

No.	Nama Sekolah	Alamat
1	SMA Negeri 1	Jl. Monginsidi No. 40 Banjarsari
2	SMA Negeri 2	Jl. Monginsidi No. 40 Banjarsari
3	SMA Negeri 3	Jl. R.E. Martadinata No. 143 Jebres
4	SMA Negeri 4	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 1 Banjarsari
5	SMA Negeri 5	Jl. Letjen Sutoyo No.18 Banjarsari
6	SMA Negeri 6	Jl. Mr. Sartono No. 30 Banjarsari
7	SMA Negeri 7	Jl. Muhammad Yamin No. 79 Serengan
8	SMA Negeri 8	Jl. Sumbing V/149 Jebres
9	SMA Muhammadiyah 1	Jl. R.M. Said No. 35 Banjarsari
10	SMA Muhammadiyah 2	Jl. Yosodipuro No. 35 Banjarsari
11	SMA Muhammadiyah 3	Jl. Kolonel Sutarto No. 62 Jebres
12	SMA Muhammadiyah 4	Jl. Slamet Riyadi No. 443 Laweyan
13	SMA Muhammadiyah 5	Jl. Kerinci No. 15 A Sekip Banjarsari
14	SMA Muhammadiyah 6	Jl.. Sumber Bregan No. 2 Banjarsari
15	SMA Kristen 1	Jl. Honggowongso No. 135 Serengan
16	SMA Kristen 2	Jl. Abdul Muis No. 45 Banjarsari
17	SMA Ign. Slamet Riyadi	Jl. Kebalen Tengah No. 3 Pasarkliwon
18	SMA Pangudi Luhur	Jl. L.U. Adi Sucipto Laweyan
19	SMA Regina Pacis	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 45 Laweyan
20	SMA Warga	Jl. Monginsidi No. 2 Jebres
21	SMA Kr. Widya Wacana	Jl. Mertolulutan No 1/4 Jebres
22	SMA Kr. Wdiya Parama	Jl. Monginsidi No. 28 Banjarsari
23	SMA Santo Paulus	Jl. Dr. Rajiman No.659 Laweyan
24	SMA Santo Xaverius	Jl. Kolonel Sugiyono Banjarsari
25	SMA Al Islam 1	Jl. Honggowongso No. 94 Laweyan
26	SMA Al Islam 2	Jl. Parangkesit No. 1 Laweyan
27	SMA Al Islam 3	Jl. Honggowongso No. 28 A Laweyan
28	SMA Islam 1	Jl. Brigjen Sudiarto No. 5 Pasarkliwon
29	SMA Islam Diponegoro	Jl. Serayu VIII/2 Pasarkliwon
30	SMA MTA	Jl. Kyai Mojo Pasarkliwon
31	SMA Al Muayyad	Jl. K.H. Samanhudi No. 64 Laweyan
32	SMA Batik 1	Jl. Slamet Riyadi No. 445 Laweya

33	SMA Batik 2	Jl. Sam Ratulangi No. 86 Laweyan
34	SMA TP 1	Jl. Krakatau Utara No. 1/6 Banjarsari
35	SMA Murni	Jl. Dr. Wahidin No. 33 Laweyan
36	SMA Yosodipuro	Jl. Yosodipuro No. 1 Laweyan
37	SMA Tri Pusaka	Jl. Kol Sutarto No. 77 Jebres
38	SMA Cokroaminoto	Jl. Yos Sudarso No. 302 Serengan
39	SMA Bhineka Karya	Jl. Letjen Suprpto No. 32 Banjarsari
40	SMA 17	Jl. R.M. Said No. 111 Banjarsari
41	SMA Widya Bhakti	Jl. Tunjung No. 75 Laweyan

Sumber : Dinas Dikpora Kota Surakarta



### **3.4. Profil SMA Negeri 1 Surakarta**

SMA Negeri 1 Surakarta merupakan satu-satunya SMA di Kota Surakarta yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Berikut profil sekolah tersebut.

#### **3.4.1. Deskripsi Sekolah**

- a. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Surakarta
- b. Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 300010
- c. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 301036105001
- d. Alamat Sekolah : Jl. Monginsidi 40 Surakarta Jawa Tengah  
Telp./Faks (0271) 652975  
e-mail [smunsa@indo.net.id](mailto:smunsa@indo.net.id)
- e. Status Sekolah : Negeri
- f. Tahun Berdiri : 15 Desember 1949
- g. Program yang tersedia : IPA = 7 kelas  
IPS = 3 kelas
- h. Luas Tanah : 7105 m<sup>2</sup>

#### **3.4.2. Visi Sekolah**

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, SMA Negeri 1 Surakarta mempunyai visi yang jelas. Visi SMA Negeri 1 Surakarta adalah Disiplin, Unggul dan Berwawasan Luas dengan semboyan Unggul dalam Ilmu, Santun dalam Bertindak.



*Sumber: SMA Negeri 1 Surakarta, 2007*

### **GAMBAR 3.5 GEDUNG SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

#### **a. Disiplin**

Disiplin mengandung arti ketaatan dan kepatuhan pada peraturan atau tata tertib yang telah disepakati bersama. Salah satu faktor yang menentukan dan memperlancar pencapaian sasaran dan tujuan adalah disiplin.

Dengan kedisiplinan diharapkan siswa dan semua warga sekolah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga dapat mengembangkan diri sesuai potensinya. Disiplin bisa terwujud bila pada diri siswa sudah tertanam kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati bersama, bukan disiplin dan patuh yang bersifat otoriter dan karena takut. Dengan kedisiplinan ini SMA Negeri 1 Surakarta akan dapat mewujudkan warga sekolah yang dapat menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya dan dapat menjadi panutan masyarakat sekitar.

b. Unggul

Unggul mengandung pengertian lebih tinggi, lebih pandai, lebih cakap melebihi dari yang lain dalam segala hal termasuk sikap. Dengan visi tersebut SMA Negeri 1 Surakarta akan membawa siswa dan warga sekolah yang lain untuk menjadi insan yang lebih dari yang lain, baik dalam hal prestasi akademik maupun nonakademik, sehingga akan dapat menjadi sosok yang patut diteladani oleh masyarakat sekitar. Keunggulan ini akan dapat dicapai dengan dukungan sikap disiplin yang teguh.

c. Berwawasan Luas

Wawasan mengandung arti cara pandang. Dengan visi ini akan mendorong siswa dan warga sekolah yang lain untuk dapat mengenali potensi diri masing-masing serta kedudukan masing-masing, sehingga dapat menempatkan diri dan dapat berkembang secara optimal.

d. Unggul dalam Ilmu, Santun dalam Bertindak

Semboyan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah agar selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara santun. Santun adalah budaya yang ingin dikembangkan sesuai dengan budaya Kota Solo sebagai sumber kebudayaan Jawa yang memberi inspirasi kepada warga sekolah agar selalu dapat santun dalam melakukan setiap tindakan.



### 3.4.3. Misi Sekolah

Untuk mewujudkan visi SMA Negeri 1 Surakarta menjabarkannya ke dalam misi sekolah. Adapun misi-misi tersebut adalah:

- a. Menumbuhkan semangat disiplin tinggi kepada seluruh warga sekolah.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga didapat hasil yang optimal, yaitu siswa dan warga sekolah yang berprestasi dalam berbagai bidang dan tingkatan.
- c. Mendorong dan membantu semua warga sekolah untuk dapat mengenali potensi diri dan mengembangkannya, sehingga dapat menjadi panutan masyarakat.



*Sumber: SMA Negeri 1 Surakarta, 2007*

**GAMBAR 3.6**  
**RUANG KELAS SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

- d. Mendorong dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan sumber daya warga sekolah, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas dirinya.
- e. Membawa warga sekolah untuk menjadi agen perubahan menuju ke arah perbaikan kehidupan bermasyarakat.

#### **3.4.4. Rekapitulasi Jumlah Nilai Rata-Rata UAN Tahun 2005 – 2007**

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah adanya nilai hasil belajar yang tinggi. Dari tahun 2005 hingga 2007, SMA Negeri 1 Kota Surakarta selalu menempati ranking pertama tingkat kota dalam perolehan nilai hasil ujian nasional. Berikut adalah tabel hasil ujian nasional yang diperoleh dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Surakarta:

**TABEL III.2.  
TABEL PEROLEHAN NILAI UJIAN TAHUN 2005-2007**

Tahun	Tertinggi	Terendah	Rata-rata	Keterangan
2005	27,79	21,25	23,56	Peringkat I tingkat Kota
2006	27,81	21,26	23,58	Peringkat I tingkat Kota
2007	28,01	21,33	23,59	Peringkat I tingkat Kota

*Sumber: Dinas Dikpora Kota Surakarta, 2007*

#### **3.4.5. Daftar Prestasi Sekolah**

Selain keunggulan dalam bidang akademis, SMA Negeri 1 juga memiliki keunggulan dalam bidang kompetisi, baik yang diadakan secara lokal maupun

nasional. Berikut daftar prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Surakarta:

**TABEL III.3.**  
**TABEL DAFTAR PRESTASI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

No.	Kejuaraan	Peringkat	Tingkat	Tahun
1	Olimpiade Biologi	I	Propinsi	2005
2	Olimpiade Matematika	II	Nasional	2005
3	Olimpiade Matematika	I	Nasional	2006
4	Debat Bahasa Inggris	I	Propinsi	2006
5	Debat Bahasa Inggris Beregu	III	Propinsi	2006
6	Kompetensi Siswa IPS	Harpn III	Propinsi	2007
7	Kompetensi Siswa Komputer	III	Nasional	2007
8	Kompetensi Siswa Astronomi	II	Propinsi	2007

*Sumber: Dinas Dikpora Kota Surakarta, 2007*



*Sumber: SMA Negeri 1 Surakarta, 2007*

**GAMBAR 3.7**  
**LABORATORIUM KOMPUTER SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

### 3.4.6. Program Kerja Sekolah

Dalam rangka mensukseskan pembelajaran di sekolah, SMA Negeri 1 Surakarta membuat program-program yang dapat menunjang adanya keberhasilan pembelajaran. Berikut tabel program kerja SMA Negeri 1 Surakarta:

**TABEL III.4**  
**PROGRAM KERJA SMA NEGERI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**  
**TAHUN 2005 – 2007**

No.	Tahun	Nama Program	Rincian Kegiatan
1	2005	A. Peningkatan Manajemen menuju Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah	1). Peningkatan dan efektifitas pola pembagian tugas, sehingga memudahkan dalam mengontrol setiap kegiatan 2). Peningkatan komunikasi dua arah antara manajer dengan masyarakat sekolah untuk mengontrol kualitas kerja 3). Peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan dengan meningkatkan partisipasi <i>stakeholder</i> bekerja sama dengan komite sekolah 4). Peningkatan manajemen sistem informasi sekolah melalui <i>data base</i> sekolah
		B. Pengembangan Kurikulum dan Sistem Evaluasi	1). Pengayaan (pendalaman materi) dan pengajaran remediasi ( <i>remedial teaching</i> ) 2). Pengadaan tes psikologi guna menganalisis bakat dan minat siswa untuk fungsi penempatan 3). Komputerisasi administrasi kurikulum dan hasil belajar 4). Penyediaan dokumen kurikulum dan sistem pengujian (alat evaluasi)
		C. Pengembangan Sarana Prasarana	1). Pengembangan sarana belajar (laboratorium dan ruang kegiatan ekstra

Lanjut ke halaman 78

Lanjutan Tabel III.4 halaman 77

No.	Tahun	Nama Program	Rincian Kegiatan
		Penunjang Kegiatan Belajar	kurikuler) 2). Pengadaan sumber belajar 3). Pengadaan alat bantu belajar 4). Pengadaan alat-alat praktikum laboratorium IPA 5). Pengadaan alat-alat laboratorium matematika 6). Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
2	2006	D. Pengembangan Profesionalisme Tenaga Edukatif  E. Peningkatan Kemampuan Tenaga Administrasi, Laboran dan Perpustakaan  F. Peningkatan Pembelajaran di luar Sekolah  A. Pengembangan Kurikulum Nasional yang adaptif Kurikulum Internasional  B. Peningkatan Sumber Daya Tenaga	1). Peningkatan kualifikasi guru 2). Peningkatan kemampuan guru (penguasaan materi, metodologi dan sistem pengujian) melalui kegiatan profesi 3). Pelaksanaan studi banding ke lembaga atau sekolah lain  1). Peningkatan profesi tenaga administrasi melalui penataran dan studi banding 2). Peningkatan kemampuan tenaga teknis laboran dan perpustakaan melalui kegiatan pelatihan dan penataran serta seminar  1). <i>Studi tour</i> dan karya wisata 2). Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di lapangan  1). Penyusunan dokumen kurikulum 2). Penyediaan dokumen metodologi 3). Pengadaan media pembelajaran 4). Penyusunan bahan ajar 5). Penyusunan <i>instrument assesment</i>  1). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris

Lanjut ke halaman 79

Lanjutan Tabel III.4 halaman 78

No.	Tahun	Nama Program	Rincian Kegiatan
		Kependidikan (Kepala Sekolah)	2). Peningkatan penguasaan dalam bidang komputer 3). Pelatihan manajemen sekolah
		C. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kependidikan (Guru)	1). Peningkatan kompetensi profesionalisme guru 2). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris / pelatihan 3). Peningkatan kemampuan menggunakan komputer / pelatihan
		D. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kependidikan (Tenaga Pendukung)	1). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris 2). Peningkatan penguasaan dalam bidang komputer 3). Peningkatan profesionalisme 4). Pengadaan laboran 5). Pengadaan teknisi komputer 6). Pengadaan tenaga administrasi sarana prasarana 7). Pengadaan tenaga administrasi kesekretariatan 8). Pengadaan alat tulis kantor
		E. Peningkatan Administrasi, Manajemen dan Organisasi	1). Pengembangan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis teknologi komunikasi dan informasi 2). Pengembangan data berbasis teknologi 3). Pengembangan <i>web site</i> 4). Pengembangan sistem jaringan 5). Pengelolaan administrasi dan manajemen sekolah 6). Pemberdayaan kelembagaan universitas (UNS) bagi peningkatan sumber daya tenaga kependidikan

Lanjut ke halaman 80

Lanjutan Tabel III.4 halaman 79

No.	Tahun	Nama Program	Rincian Kegiatan
		F. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	7). Pengembangan unit pelayanan bagi siswa 8). Konsultasi dan monitoring 1). Pengadaan LCD dan laptop untuk fasilitas belajar mengajar di ruang kelas 2). Pengadaan buku referensi 3). Pembuatan sistem katalog untuk perpustakaan 4). Pengadaan komputer untuk ruang perpustakaan 5). Pengadaan kebutuhan laboratorium 6). Pengadaan ruang komputer beserta <i>server</i> 7). Pembenahan kantin 8). Renovasi ringan auditorium 9). Pengadaan kebutuhan alat olahraga
3	2007	A. Pengembangan Kurikulum Nasional yang adaptif Kurikulum Internasional	1). Penyediaan dokumen metodologi 2). Penyusunan <i>instrument assesment</i>
		B. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kependidikan	1). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris 2). Peningkatan penguasaan dalam bidang komputer 3). Pelatihan manajemen sekolah
		C. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kependidikan (Guru)	1). Peningkatan kompetensi profesionalisme guru 2). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris / pelatihan 3). Peningkatan kemampuan menggunakan komputer / pelatihan

Lanjut ke halaman 81

Lanjutan Tabel III.4 halaman 80

No.	Tahun	Nama Program	Rincian Kegiatan
		D. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kependidikan (Tenaga Pendukung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris</li> <li>2). Peningkatan penguasaan dalam bidang komputer</li> <li>3). Peningkatan profesionalisme</li> <li>4). Pengadaan laboran</li> <li>5). Pengadaan teknisi komputer</li> <li>6). Pengadaan tenaga administrasi sarana prasarana</li> <li>7). Pengadaan tenaga administrasi kesekretariatan</li> <li>8). Pengadaan alat tulis kantor</li> </ol>
		E. Peningkatan Administrasi, Manajemen dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pengembangan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis teknologi komunikasi dan informasi</li> <li>2). Pengembangan data berbasis teknologi</li> <li>3). Pengembangan sistem jaringan</li> <li>4). Pemberdayaan kelembagaan universitas (UNS) bagi peningkatan sumber daya tenaga kependidikan</li> <li>5). Pengembangan unit pelayanan bagi siswa</li> <li>6). Konsultasi dan monitoring</li> </ol>
		F. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Pengadaan Kebutuhan Laboratorium IPA

Sumber: SMA Negeri 1 Surakarta, 2007



**BAB IV**  
**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**  
**SARANA PRASARANA PENDIDIKAN**  
**DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

**4.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan**

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut adalah input, proses dan output. Ketiga komponen itu merupakan sebuah sistem, karena ketiganya saling bergantung. Dalam komponen proses ada banyak faktor. Salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan pendidikan adalah sarana prasarana.

Menurut beberapa responden makna sarana prasarana adalah sebagai alat pendukung proses pembelajaran. Alat tersebut berupa barang-barang baik berupa meja kursi, komputer, laboratorium, gedung/ruang kelas, buku, tempat olah raga, multimedia dan lain-lain yang berguna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Karena merupakan alat untuk mendukung proses pembelajaran maka sarana prasarana merupakan suatu kebutuhan yang mana tiap tahun akan selalu berubah mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Oleh karena itu, maka sekolah harus memiliki program dalam peningkatan kualitasnya. Sejalan dengan dimulainya sekolah nasional bertaraf internasional, maka program peningkatan kualitas sarana prasarana menjadi sangat mutlak. Karena sarana prasarana dalam

SNBI setidaknya harus mengikuti standar yang menjadi kebutuhan sekolah internasional.

Dari hasil wawancara, ternyata seluruh responden memandang perlu dilaksanakannya program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Karena untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar diperlukan sarana prasarana yang memadai sehingga akan tercipta kualitas pendidikan yang baik .

*Program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan, bahkan sangat diperlukan. Karena sarana prasarana pendidikan dapat memacu atau memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar di sekolah yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan (E.2.).*

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu responden lainnya.

*Di era globalisasi ini perlu sekali sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar agar bisa optimal, utamanya sarana pembelajaran dengan ICT, maka perlu sarana komputer dan internet (E.1.).*

Karena merupakan kebutuhan yang sangat penting, maka program peningkatan kualitas sarana prasarana perlu didukung. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah dengan adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat maka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 22 Tahun 2003, dikatakan bahwa sarana prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah maupun masyarakat. Demikian juga dalam pendanaannya merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini senada dengan pendapat para responden. Mereka berpendapat bahwa masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap terlaksananya program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

*Masyarakat dalam hal ini orang tua dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Kalau pemerintah dapat menyalurkan bantuannya dalam bentuk block grant (D.6.).*

Sependapat dengan jawaban tersebut, responden lain juga memberi tanggapan yang senada.

*Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan antara lain : Pemerintah, masyarakat dan sekolah itu sendiri atau komponen-komponen yang ada di sekolah (guru, kepala sekolah, karyawan dan komite sekolah) (E.2.).*

#### **4.2. Kesiapan Sarana Prasarana Pendidikan dalam Mendukung Sekolah Nasional Bertaraf Internasional**

Sarana prasarana pendidikan merupakan kebutuhan mutlak dalam rangka memfasilitasi siswa dalam belajar. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai akan membantu siswa untuk berprestasi. Dari pertanyaan terbuka kepada beberapa responden, ternyata mereka setuju dengan pendapat tersebut.

*Dengan adanya sarana prasarana yang ada sedikit banyak ikut membantu prestasi anak lebih maju (B.4.)*

*Ternyata kesediaan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta dapat meningkatkan prestasi anak dan prestasi sekolah (B.1.).*

Untuk itu maka sarana prasarana pendidikan harus benar-benar tercukupi agar benar-benar membantu siswa dalam belajar. Apalagi SMA Negeri 1 telah ditunjuk sebagai sekolah bertaraf Internasional, maka penyediaan sarana prasarana pendidikan harus sudah mengacu pada standar internasional.

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti karena beberapa sarana prasarana tersebut seperti ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium komputer telah memenuhi standar yang ditentukan.

Tabel IV.1. berikut ini menjelaskan kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta.

**TABEL IV.1  
KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN**

NO	KOMPONEN	STANDAR	KONDISI NYATA
1	Ruang Kelas		
1.1.	Luas	90 % ruang kelas berukuran $\geq 63 \text{ m}^2$ ;	70 % ruang kelas berukuran $\geq 63 \text{ m}^2$ ;
1.2.	Ratio dengan jml siswa	1 : 24	1 : 24
1.3.	Fasilitas ICT	Semua kelas atau minimum 1 kelas untuk tiap-tiap tingkat memiliki 1 set perangkat ICT (1 set PC/laptop, 1 set speaker, 1 LCD, 1 set screem projector)	Minimum 1 kelas untuk tiap-tiap tingkat memiliki 1 set perangkat ICT ( 1 set PC/laptop, 1 set speaker, 1 LCD, 1 set sreen projector)
2	Perpustakaan	0.2 $\text{m}^2$ /siswa untuk sekolah dengan jumlah siswa < 600 orang;	baru tercapai 50%;

		Dapat menampung 5 % dari siswa terdaftar dan kondusif untuk membaca dan studi individual;	baru tercapai 50 %;
		Memiliki buku teks dalam bentuk cetak atau digital untuk setiap mata pelajaran minimal sama dengan jumlah siswa dalam 1 kelas;	baru tercapai 50 %
		Memiliki buku referensi ( 5 judul) baik cetak maupun digital sebagai penunjang buku teks untuk setiap mata pelajaran;	tercapai 70 %
		Sekolah berlangganan periodicals terpilih baik cetak maupun digital (jurnal, majalah, buletin, surat kabar, dsb) dalam jumlah yang memadai untuk peningkatan mutu siswa dan profesionalisme guru dan staf lainnya;	tercapai 85 %
		Sekolah menggunakan sistem katalog yang diakui secara internasional dan berbasis komputer;	Sekolah sudah menggunakan sistem katalog yang diakui secara internasional namun belum berbasis komputer;
		Memiliki komputer untuk perpustakaan termasuk 5 buah multi media;	Sudah memiliki komputer untuk perpustakaan namun baru 1 buah untuk multi media;
		Memiliki ruang baca yang memadai;	Tercapai 85 %
		Memiliki komputer yang disediakan bagi pemakai perpustakaan untuk mengakses berbagai informasi maupun bahan ajar;	Belum memiliki komputer yang disediakan bagi pemakai perpustakaan untuk mengakses berbagai informasi maupun bahan

			ajar;
3	Laboratorium Komputer	<p>Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan ber AC;</p> <p>Memiliki jumlah komputer sesuai dengan rata-rata jumlah siswa (maksimum 24 siswa per rombel);</p> <p>Memiliki teknisi dengan jumlah memadai untuk membantu pelaksanaan pembelajaran siswa dan perawatan komputer;</p> <p>Memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam laboratorium komputer</p>	<p>Telah memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan ber AC;</p> <p>90 % telah memiliki jumlah komputer sesuai dengan rata-rata jumlah siswa (maksimum 24 siswa per rombel);</p> <p>Belum memiliki teknisi dengan jumlah memadai untuk membantu pelaksanaan pembelajaran siswa dan perawatan komputer;</p> <p>Telah memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam laboratorium komputer sebanyak 95 %</p>

Sumber : Hasil Analisis 2008

Sebagai sekolah berstandar internasional, tentunya sarana prasarana harus sudah mendukung. Dari pertanyaan terbuka kepada para responden, dapat disimpulkan bahwa ternyata meskipun sarana prasarana yang ada sudah dapat dikatakan baik, namun untuk mendukung program sekolah bertaraf internasional sarana prasarana pendidikan tersebut masih perlu ditambah dan ditingkatkan lagi. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi proses belajar mengajar sesuai dengan standar sekolah bertaraf internasional.

*Sebagai sekolah bertaraf internasional, sarana prasarana pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta dapat dikatakan belum begitu siap. Untuk itu perlu peningkatan, penambahan sarana prasarana sehingga bisa memfasilitasi proses belajar mengajar sesuai dengan standar sekolah bertaraf internasional (D.6.).*

#### **4.3. Analisis Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta**

Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dari tahun 2005 hingga 2007, dalam pelaksanaannya dibiayai oleh berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut adalah dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Departemen Pendidikan Pusat. Adapun rincian pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel IV.12.

Dari tabel tersebut pada IV.12 diketahui bahwa pada tahun 2005, program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta tidak dalam rangka mengejar standar sekolah bertaraf Internasional. Hal ini terjadi disebabkan pada saat itu sekolah ini belum ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai sekolah bertaraf Internasional.

Lain halnya dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2006 nampak jelas bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka memenuhi standar sekolah bertaraf Internasional. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan pembelian laptop dan LCD. Seperti kita ketahui bahwa standar dalam sekolah bertaraf Internasional adalah adanya LCD dan laptop dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian nampaknya kegiatan ini harus dilakukan lagi mengingat kondisi nyata yang ada belum semua kelas menggunakan fasilitas *ICT* ini dalam proses belajar mengajar.

Selain fasilitas ICT dalam pembelajaran di kelas, program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah untuk melengkapi kebutuhan perpustakaan. Dalam standar sekolah bertaraf Internasional, perpustakaan harus memiliki buku teks dalam bentuk cetak atau digital untuk setiap mata pelajaran minimal sama dengan jumlah siswa dalam 1 kelas dan memiliki 5 judul buku referensi baik cetak maupun digital sebagai penunjang buku teks untuk setiap mata pelajaran.

Apabila kita lihat sumber pendanaan yang dilaksanakan pada program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan pada tahun 2006, ternyata sebagian besar sumber dana tersebut berasal dari APBN. Hal ini menandakan bahwa konsekuensi dari penunjukan SMA Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah bertaraf Internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah dengan memberikan dana guna secepatnya mempersiapkan sarana prasarananya.

Selain sumber dana dari APBN, dari tabel tersebut diketahui bahwa Komite Sekolah juga memberikan peranannya dalam mendukung keterlaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Ini berarti bahwa peran Komite Sekolah sebenarnya hanya mencukupi kekurangan dana yang ada dan bukannya sebagai sumber pendanaan yang utama dalam program tersebut.



**TABEL IV.2.**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**  
**SARANA PRASARANA PENDIDIKAN**

No	Program	Rincian Kegiatan	Rincian Output	Realisasi (Bulan)	Sumber Dana
1	Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar (Tahun 2005)	1) Pengembangan sarana belajar (laboratorium dan ruang kegiatan ekstra kurikuler)	100 m2	Januari – Maret	KS, DK
		2) Pengadaan sumber belajar	50 buku biologi 50 bk bahasa Inggris	Februari	KS
		3) Pengadaan alat bantu belajar	10 papan tulis	April	KS
		4) Pengadaan alat-alat praktikum laboratorium IPA	25 tabung reaksi 5 pipa U 5 rak tabung 5 lensa cekung	Juni	DP
		5) Pengadaan alat-alat laboratorium matematika	10 blok logika 4 kerangka bangun 2 model arah 3 angka	Agustus	DP
		6) Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	2 bh VCD 10 tape recorder	Oktober	APBN
2	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (Tahun 2006)	1) Pengadaan LCD dan Laptop untuk fasilitas belajar mengajar di ruang kelas	6 buah LCD 6 buah laptop	Maret	APBN
		2) Pengadaan buku referensi	100 buku fisika 100 matematika	Maret	APBN

		3) Pembuatan sistem katalog untuk perpustakaan	4 orang	Mei	KS
		4) Pengadaan komputer untuk ruang perpustakaan	5 buah	Maret	APBN
		5) Pengadaan kebutuhan laboratorium	1 buah cro 10 bh mikroskop 1 neraca digital 3 bh molimod	Juli	APBN
		6) Pengadaan ruang komputer beserta server	3 bh komputer 1 buah server	Agustus	APBN
		7) Pembenahan kantin	4 buah	September	KS
		8) Renovasi ringan auditorium	400 m2	Juni – Agustus	KS
		9) Pengadaan kebutuhan alat olah raga	1 unit climbing, 1 lap. badminton	November	KS
3	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (Tahun 2007)	Pengadaan Kebutuhan Laboratorium IPA	10 meja panjang 25 kursi	Juli	KS, DP

Sumber : Hasil Analisis 2008

Keterangan :

KS : Komite Sekolah

DK : Dinas Pendidikan Kota

DP : Dinas Pendidikan Propinsi

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pusat)

#### **4.4. Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Dalam sub bab ini akan membahas tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

##### **4.4.1. Tahap Awal Kegiatan**

Pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah dengan memberikan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas, karena tidak hanya berupa pendanaan saja. Bentuk-bentuk partisipasi dapat diwadahi dengan cara menyumbang uang, menyumbang barang, menyumbang tenaga, menyumbang usulan/gagasan dan bentuk lainnya yang berupa gabungan dari bentuk-bentuk yang disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam cara berpartisipasi adalah kurang bervariasi karena dari kelima jawaban hanya tiga jawaban yang menjadi pilihan responden. Sebanyak 6 (enam) responden memilih bentuk partisipasi mereka dengan cara menyumbang uang. Jumlah ini berarti mencapai 29 % dari seluruh responden. Selanjutnya 52 % dari semua responden, yaitu sejumlah 11 orang memilih bentuk partisipasi menyumbang usulan/gagasan sebagai cara berpartisipasi mereka. Ini berarti sebagian besar responden atau lebih dari separoh responden memberikan sumbangan usulan/gagasan. Bentuk ini adalah bentuk termudah dari bentuk-bentuk lainnya. Namun demikian dengan ikut memberikan

usulan berarti ada rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sekolah.

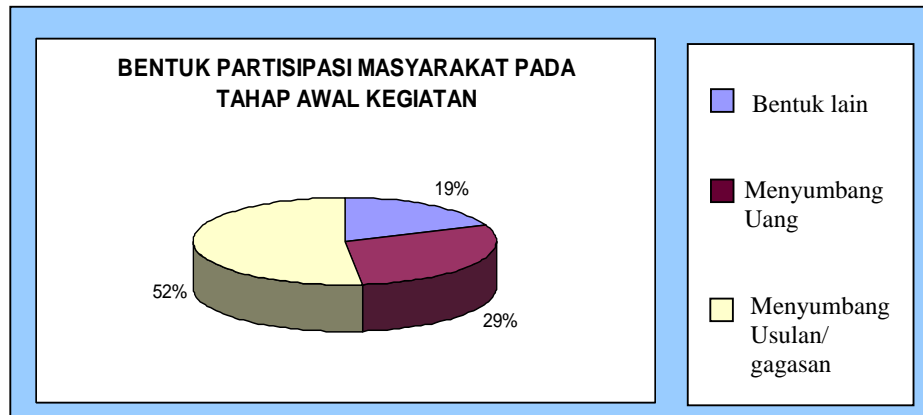
Pilihan selanjutnya adalah dengan cara bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang uang dengan usulan/gagasan dan gabungan antara menyumbang tenaga dan usulan/gagasan. Responden yang memilih bentuk ini adalah sejumlah 4 orang atau 19 % dari seluruh responden. Secara lebih jelas hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel IV.3 dan Gambar 4.1.

**TABEL IV.3.  
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA TAHAP AWAL KEGIATAN**

NO	BENTUK PARTISIPASI	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Menyumbang uang	6	29
2	Menyumbang barang	-	-
3	Menyumbang tenaga	-	-
4	Menyumbang usulan/gagasan	11	52
5	Bentuk lain	4	19
<b>JUMLAH</b>		21	100

*Sumber : Hasil analisis 2008*

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas bahwa, sebagian besar responden, yaitu sejumlah 52 % nya memilih untuk menyumbang usulan/gagasan dalam berpartisipasi. Hal ini berarti mempertegas uraian di awal, bahwa bentuk partisipasi tidak lagi diartikan sempit (tidak hanya terbatas pada pembiayaan, pendanaan maupun material). Karena tidak lebih dari jumlah tersebut, yaitu



*Sumber: Hasil Analisis, 2008*

**GAMBAR 4.1  
DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI  
PADA TAHAP AWAL KEGIATAN**

sebanyak 29 % ikut berpartisipasi dengan cara menyumbang uang. Selanjutnya urutan ketiga, yaitu sejumlah 19 % sisanya melakukan partisipasi dengan cara bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang usulan/gagasan dengan tenaga dan antara menyumbang uang dengan menyumbang usulan/gagasan.

#### **4.4.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

Partisipasi masyarakat dapat diuraikan ke dalam berbagai bentuk. Pada tahap pelaksanaan kegiatan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 ini adalah berupa dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah, membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut, diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah, diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa, diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah, serta dalam bentuk lain.

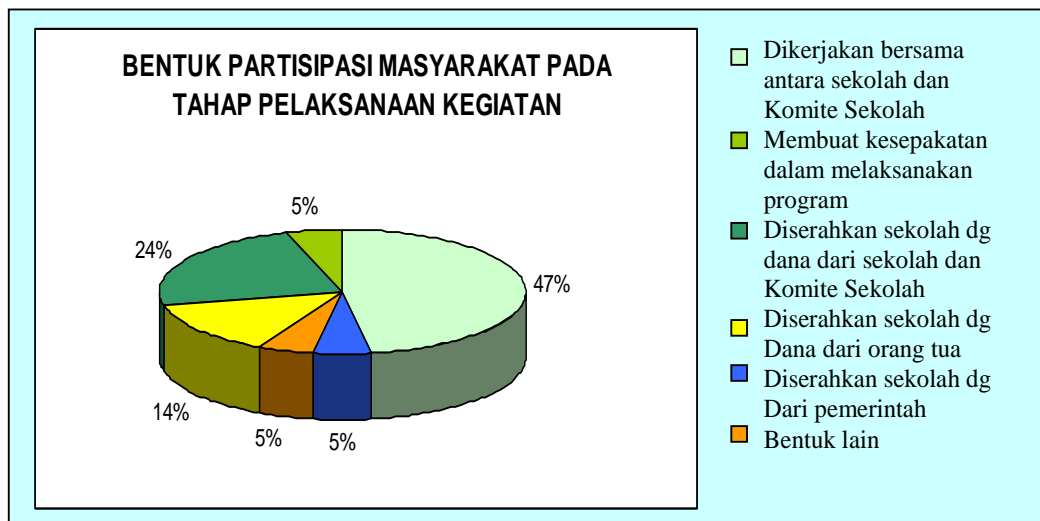
Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan ternyata cukup bervariasi karena dari keenam pilihan jawaban semua responden memberikan pilihannya. Sebanyak 11 (sebelas) responden memilih untuk dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah. Hal ini berarti sejumlah 47 % dari seluruh responden memilih jawaban tersebut. Selanjutnya 5 % dari jumlah total responden, yaitu sebanyak 1 orang memilih bentuk partisipasi dengan membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut. Bentuk selanjutnya adalah dengan diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah dipilih oleh 1 (satu) orang responden. Prosentase jumlah tersebut berarti mencapai 5 % dari seluruh responden. Sejumlah 14 % dari semua responden yaitu sebanyak 3 (tiga) orang memilih jawaban diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa. Untuk pilihan jawaban diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari 5 orang responden. Jumlah ini berarti mencapai 24 % dari seluruh responden. Sedangkan sisanya, yaitu 1 (satu) orang responden atau 5 % dari 21 responden memilih bentuk lain dalam berpartisipasi. Responden tersebut memilih bentuk partisipasinya dengan mengusulkan baik melalui dana APBD II, APBD I maupun APBN sesuai dengan analisis kebutuhannya. Untuk lebih ringkasnya, uraian tersebut dapat dijelaskan ke dalam tabel IV.4 dan Gambar 4.2.

**TABEL IV.4.**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**PADA TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO	BENTUK PARTISIPASI	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah	11	47
2	Membuat kesepakatan/aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut	1	5
3	Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah	1	5
4	Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa	3	14
5	Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah	5	24
6	Bentuk lain	1	5
	JUMLAH	21	100

*Sumber : Hasil analisis 2008*

Dari penjelasan tersebut di atas berarti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sejumlah 47 %nya memilih untuk dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah. Hal ini berarti bahwa Komite Sekolah bukanlah sebagai pelengkap saja dalam sebuah sekolah namun telah menjadi partner dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Pilihan kedua yaitu diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari sejumlah 24 % responden.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 4.2**  
**DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI**  
**PADA TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### 4.4.3. Rangkuman Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat pada tahap awal kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan maka dapat dikaji bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara rata-rata dari kedua tahap tersebut adalah sebagaimana tabel IV.5.

Dari tabel diketahui bahwa pada tahap awal kegiatan sebagian besar responden memberikan partisipasinya dalam bentuk sumbangan usulan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan bentuk partisipasinya adalah dengan cara dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah.



**TABEL IV.5.**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

NO	BENTUK PARTISIPASI	FREKUENSI	PROSENTASE
<b>A Tahap Awal Kegiatan</b>			
1	Menyumbang uang	6	29
2	Menyumbang barang	-	-
3	Menyumbang tenaga	-	-
4	Menyumbang usulan/gagasan	11	52
5	Bentuk lain	4	19
Jumlah		21	100
<b>B Tahap Pelaksanaan Kegiatan</b>			
1	Dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah	11	48
2	Membuat kesepakatan/aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut	1	5
3	Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah	1	5
4	Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa	3	14
5	Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah	5	24
6	Bentuk lain	1	5
JUMLAH		21	100

*Sumber : Hasil Analisis 2008*

#### **4.5. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Dalam sub bab ini dibahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Dengan melakukan analisis ini maka akan diketahui derajat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana. Derajat keterlibatan masyarakat tersebut diukur dari variable-variabel tingkat kehadiran dalam pertemuan, keaktifan dalam diskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesepakatan untuk membayar sumbangan.

#### **4.5.1. Analisis tingkat kehadiran dalam pertemuan**

Dalam menganalisis tingkat kehadiran dalam pertemuan ini digunakan skala penilaian dengan mengacu pada teori Sherry Arnstein yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat. Kedelapan tangga tersebut adalah : a). Hadir karena dipaksa; b). Hadir sekedar memenuhi undangan; c). Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat; d). Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapatnya tidak diperhitungkan; e). Hadir dan memberikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan; f). Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara; g). Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan; dan h). Hadir dan mampu membuat keputusan.

Dari hasil penelitian, tingkat kehadiran dalam pertemuan dapat dijelaskan pada tabel IV.6.

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat pertemuan, sebagian besar responden hadir dalam pertemuan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat namun pendapatnya tidak diperhitungkan, yaitu sebanyak 10 responden atau sekitar 48 %. Hal ini menandakan adanya pesimisme dari beberapa responden.

Kemudian disusul dengan hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama sejumlah 19 % atau 4 orang responden. Sebanyak masing-masing dua orang atau 9,3 % memberikan pilihan untuk hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan hadir dan mampu untuk membuat keputusan dalam

**TABEL IV.6.**  
**TINGKAT KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN**

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Prosentase (%)	bobot	n x bobot
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Hadir karena dipaksa	-	-	1	-
		Hadir sekedar memenuhi undangan	1	4,8	2	2
		Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat	1	4,8	3	3
		Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapatnya tidak diperhitungkan	10	48	4	40
		Hadir dan menyampaikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan	1	4,8	5	5
		Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama	4	19	6	24
		Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan	2	9,3	7	14
		Hadir dan mampu untuk membuat keputusan	2	9,3	8	16
	Jumlah		21	100		104

*Sumber: Hasil Analisis 2008*

berpartisipasi. Selanjutnya pilihan hadir sekedar memenuhi undangan, hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat dan hadir untuk menyampaikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhatikan dipilih oleh masing-masing satu orang responden. Tidak ada responden yang memilih hadir karena dipaksa.

Untuk menentukan kategoraki tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel di atas, dilakukan penghitungan sebagai berikut :

Dari 1 (satu) variabel pertanyaan di atas terdapat 8 (delapan) pilihan jawaban pertanyaan dengan skor berkisar antara 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Dengan demikian dari setiap individu akan diperoleh skor minimum 1, yaitu  $1 \times 1$  dan skor maksimum dari setiap individu adalah 8, yaitu dari  $1 \times 8$ . Bila jumlah responden 21 orang, maka skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat adalah  $21 \times 1 = 21$  dan skor maksimum dari tingkat partisipasi masyarakat adalah  $21 \times 8 = 168$ . Setelah diketahui skor minimum dan maksimum maka ditemukan jarak intervalnya, yaitu  $(168 - 21)/8 = 18,375$ . Sehingga dengan menggunakan tipologi dari Arnstein maka tingkat partisipasi masyarakat adalah :

**TABEL IV.7.  
JUMLAH SKOR TINGKAT PARTISIPASI**

No Tangga	Tingkat Partisipasi	Jumlah Skor
8	<i>Citizen Control</i>	149,625 - 168
7	<i>Delegated Power</i>	131,26 - 149,625
6	<i>Partnership</i>	112,876 - 131,25
5	<i>Placation</i>	94,6 - 112,875
4	<i>Consultation</i>	76,126 - 94,5
3	<i>Informing</i>	57,76 - 76,125
2	<i>Therapy</i>	39,376 - 57,75
1	<i>Manipulation</i>	21 - 39,375

*Sumber : Hasil Analisis 2008*

Berdasarkan pada tabel IV.5 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat keaktifan hadir pada pertemuan adalah 104. Jumlah skor tersebut bila mengacu pada tabel IV.6 termasuk dalam tingkat *placation* (tangga kelima dari delapan tangga Arnstein).

Pada tingkat *placation* dapat diartikan bahwa masyarakat yang hadir dalam rapat/pertemuan tersebut sudah memiliki beberapa pengaruh. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tingkat *placation* ini termasuk dalam derajat penghargaan atau *degree of tokenisme*, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

#### **4.5.2. Analisis Keaktifan Dalam Berdiskusi dan Mengemukakan Pendapat**

Untuk mengukur tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat ini digunakan skala penilaian yang mengacu pada tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein. Tangga partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari 8 (delapan) tangga, yaitu : a). Berdiskusi karena dipaksa; b). Mendapat informasi dan berdiskusi ala kadarnya; c). Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi; d). Mendapat informasi dan boleh berdiskusi tapi hasil diskusi tidak diperhitungkan; e). Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan; f). Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara; g). Aktif berdiskusi dan

memiliki kewenangan membuat keputusan; h). Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan.

Tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini :

**TABEL IV.8.**  
**TINGKAT KEAKTIFAN DALAM BERDISKUSI DAN**  
**MENGEMUKAKAN PENDAPAT**

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Prosentase (%)	bobot	n x bobot
1	Tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat	Berdiskusi karena dipaksa	-	-	1	-
		Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya	2	9,5	2	4
		Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan berdiskusi	-	-	3	-
		Mendapat informasi dan boleh berdiskusi tetapi hasil diskusi tidak diperhitungkan	3	14	4	12
		Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan	3	14	5	15
		Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara	9	43,5	6	54
		Aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan	2	9,5	7	14
		Aktif berdiskusi dan mampu untuk membuat keputusan	2	9,5	8	16
	Jumlah		21	100		115

*Sumber: Hasil Analisis 2008*

Dari tabel IV.7 di atas, maka diketahui bahwa sebagian besar responden ternyata aktif dalam berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara. Jumlah tersebut mencapai 43,5 % dari total jumlah responden. Angka tersebut setara dengan 9 orang responden. Jawaban terbanyak kedua adalah mendapat informasi dan boleh berdiskusi tetapi hasil diskusi tidak diperhitungkan. Jumlah responden yang memilih jawaban tersebut adalah 3 orang atau setara dengan 14 %. Hal ini sama jumlahnya dengan pilihan mendapat informasi dan boleh berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan, yaitu sebanyak 3 orang (14%). Urutan ketiga yaitu mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya, aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan serta aktif berdiskusi dan mampu untuk membuat keputusan. Ketiga pilihan jawaban tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu masing-masing 2 orang responden. Sedangkan pilihan jawaban berdiskusi karena dipaksa dan mendapat informasi namun tidak diberi kesempatan berdiskusi tidak ada yang memilihnya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam keaktifan berdiskusi dan mengemukakan pendapat memiliki skor 115. Apabila mengacu pada tabel IV.6, maka jumlah skor tersebut masuk dalam kategori *partnership*, yaitu tangga keenam dari delapan tangga tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein.

Pada tingkat *partnership* atau kerjasama, kekuasaan dibagi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan atas kesepakatan bersama. Dengan demikian, tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah disepakati untuk saling berbagi.

#### **4.5.3. Analisis Keaktifan Dalam Kegiatan Fisik**

Dalam menganalisis keaktifan dalam kegiatan fisik ini digunakan skala penilaian yang mengacu pada 8 (delapan) tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein. Tangga partisipasi masyarakat tersebut adalah : a). Terlibat karena dipaksa; b). Terlibat sekedarnya saja; c). Terlibat tanpa mendapat kesempatan untuk menyampaikan ide-ide; d). Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan; e). Terlibat tetapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan; f). Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama; g). Terlibat dan memiliki memiliki kewenangan melaksanakan ide; h). Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar.

Tingkat keaktifan dalam kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel IV.9.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memilih jawaban terlibat tetapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan. Jawaban ini dipilih oleh 5 orang responden (24%). Jumlah ini sama dengan yang memilih terlibat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan ide. Selanjutnya sebanyak tiga orang memilih jawaban terlibat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan ide. Jumlah tersebut mencapai 14 % dari jumlah total responden. Sedangkan jawaban terakhir yang dipilih oleh responden adalah terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan serta terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar. Kedua jawaban tersebut dipilih oleh masing-masing dua orang responden atau 9,5 %.



**TABEL IV.9.**  
**TINGKAT KEAKTIFAN DALAM KEGIATAN FISIK**

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Prosentase (%)	bobot	n x bobot
1	Tingkat keaktifan dalam kegiatan fisik	Terlibat karena dipaksa	-	-	1	-
		Terlibat sekedarnya saja	4	19	2	8
		Terlibat tanpa mendapat kesempatan berpendapat	-	-	3	-
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan	2	9,5	4	8
		Terlibat tetapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan	5	24	5	25
		Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama	5	24	6	30
		Terlibat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan ide	3	14	7	21
		Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar	2	9,5	8	16
	Jumlah		21	100		108

*Sumber: Hasil Analisis 2008*

Berdasarkan pada tabel IV.8 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan dalam kegiatan fisik memiliki skor 108. Jumlah skor tersebut bila mengacu pada tabel IV.6 termasuk dalam tingkat *placation* (tangga kelima dari delapan tangga Arnsntein).

Pada tingkat *placation* dapat diartikan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan fisik. Selain itu masyarakat juga memiliki beberapa pengaruh. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih ditentukan oleh pihak yang memiliki

kekuasaan. Tingkat placation ini termasuk dalam derajat penghargaan atau *degree of tokenisme*, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan fisik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa ide-ide mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

#### **4.5.4. Analisis Kesiediaan untuk Membayar**

Untuk mengukur tingkat kesiediaan untuk membayar ini digunakan skala penilaian yang mengacu pada tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein. Tangga partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari 8 (delapan) tangga, yaitu : a). Membayar karena dipaksa dan tidak memperhatikan manfaatnya; b). Membayar sekedaranya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya; c). Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya; d). Membayar dan berkesempatan menyampaikan ide, tapi ide tidak diperhitungkan; e). Membayar dan berkesempatan menyampaikan ide tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan di lapangan; f). Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana; g). Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatannya; h). Membayar dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar.

Tingkat kesiediaan untuk membayar dijelaskan pada tabel IV.10 berikut ini :

**TABEL IV.10.**  
**TINGKAT KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR**

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Prosentase (%)	bobot	n x bobot
1	Tingkat kesediaan untuk membayar	Membayar karena dipaksa dan tidak memperhatikan manfaatnya	-	-	1	-
		Membayar sekeadarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya	1	4,8	2	2
		Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya	4	19,1	3	12
		Membayar dan berkesempatan menyampaikan ide tetapi hanya ide pemanfaatan dana tidak diperhitungkan	3	14,2	4	12
		Membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan di lapangan	3	14,2	5	15
		Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana	5	24	6	30
		Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatannya	3	14,2	7	21
		Membayar dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar	2	9,5	8	16
	Jumlah		21	100		108

*Sumber: Hasil Analisis 2008*

Dari tabel IV.10 di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden ternyata berpartisipasi dengan membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana. Jumlah tersebut mencapai 24 % dari

total jumlah responden, atau setara dengan 5 orang responden. Jawaban terbanyak kedua adalah membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya. Jumlah responden yang memilih jawaban tersebut adalah 4 orang atau setara dengan 19,1 %. Sedangkan pilihan terbanyak ketiga adalah membayar dan berkesempatan menyampaikan ide tetapi ide pemanfaatan dana tidak diperhitungkan, membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan di lapangan, serta membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatannya. Masing-masing jawaban tersebut dipilih oleh 3 orang responden. Jumlah tersebut sama dengan 14,2 %. Urutan selanjutnya adalah membayar dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar dipilih oleh 2 orang responden atau 9,5 %. Sedangkan 1 (4,8%) orang memilih membayar ala kadarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya. Tidak ada responden yang memilih membayar karena dipaksa dan tidak memperhatikan pemanfaatannya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan untuk membayar memiliki skor 108. Apabila mengacu pada tabel IV.6, maka jumlah skor tersebut masuk dalam kategori *placation*, yaitu tangga kelima dari delapan tangga tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein.

Pada tingkat *placation* dapat diartikan bahwa masyarakat bersedia untuk membayar namun tidak memiliki pengaruh dalam pemanfaatan dananya. Masih ada beberapa hal yang ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tingkat *placation* ini termasuk dalam derajat penghargaan atau *degree of tokenisme*, yaitu

suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan fisik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa ide-ide mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

#### 4.5.5 Rangkuman Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dari keempat analisis di atas, maka dapat dirangkum sebagaimana tabel IV.11 berikut ini :

**TABEL IV.11.  
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN**

No	Variabel	Skor
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	104
2	Keaktifan dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat	115
3	Keterlibatan dalam kegiatan fisik	108
4	Kesediaan untuk membayar	108
	Jumlah	435

*Sumber: Hasil Analisis 2008*

Dari tabel IV.11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran dalam pertemuan memiliki skor 104. Skor ini termasuk dalam tingkat placation. Selanjutnya keaktifan dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat memperoleh skor 115, sehingga dikategorikan ke dalam tingkat partnership. Masing-masing memperoleh skor 108 untuk keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar. Dengan demikian kedua variabel ini masuk ke dalam tingkat placation. Setelah masing-masing variabel diketahui skornya, maka secara keseluruhan juga dapat diketahui skornya, yaitu 435.

Telah disebutkan dalam metode penelitian bahwa bila jumlah populasi adalah 21 orang responden maka diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi, yaitu  $21 \times 8 = 84$ . Sedangkan skor maksimumnya adalah  $21 \times 32 = 672$ . Dengan demikian jarak intervalnya adalah  $(672-84) / 8 = 73.5$

Setelah diketahui skor minimum, skor maksimum dan jarak intervalnya, maka akan diketahui skor dari masing-masing tingkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.12.

**TABEL IV.12.**  
**TABEL SKOR PARTISIPASI**

Jenjang Partisipasi Arnstein		Skor
8	<i>Citizen Control</i>	599,5 – 672
7	<i>Delegated Power</i>	526 – 598,5
6	<i>Partnership</i>	452,5 – 525
5	<i>Placation</i>	379 – 451,5
4	<i>Consultation</i>	306,5 – 378
3	<i>Informing</i>	233 – 304,5
2	<i>Therapy</i>	158,5 – 231
1	<i>Manipulation</i>	84 – 157,5

Sumber : Hasil Analisis

Berdasar tabel IV.12 di atas, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan adalah termasuk ke dalam tingkat *placation*, karena memiliki skor 435. Pada tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tingkat *placation* ini termasuk dalam derajat penghargaan atau *degree of tokenisme*, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat dapat berpartisipasi namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa ide-ide mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

#### **4.6. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Dengan demikian dalam bab ini akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap sesuatu hal berhubungan dengan faktor internal dan eksternal yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari individu responden itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Dari hasil penelitian dilakukan perhitungan distribusi frekuensi. Secara lengkap perhitungan tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel IV.13.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata faktor jenis kelamin responden yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 didominasi kaum pria, yaitu sebanyak 19 orang. Dengan kata lain 90,5 % dari seluruh responden adalah pria. Hal ini mempertegas pendapat Soekanto (1982) bahwa partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan

**TABEL IV.13.**  
**DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL**

NO	KRITERIA	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
<b>A. Jenis Kelamin</b>			
1	Pria	19	90,5
2	Wanita	2	9,5
<b>B. Usia</b>			
1	Di bawah 20 tahun	1	5
2	21 – 30 tahun	-	-
3	31 – 40 tahun	6	28
4	41 – 50 tahun	10	48
5	Lebih dari 50 th	4	19
<b>C. Pendidikan</b>			
1	Sarjana S 3	3	14
2	Sarjana S 2	9	43
3	Sarjana S 1	8	38
4	Sarjana Muda	-	-
5	Lulus SMA / sederajat	-	-
6	Lulus SMP / sederajat	1	5
<b>D. Pekerjaan</b>			
1	PNS / ABRI	4	19
2	Guru / Dosen	6	28,5
3	Dokter	3	14
4	Pensiunan	-	-
5	Pegawai Swasta	1	5
6	Wiraswasta	6	28,5
7	Siswa / Mahasiswa	1	5
8	Lain-lain	-	-
<b>E. Penghasilan</b>			
1	Lebih dari 5 juta rupiah	13	62
2	2,5 – 5 juta rupiah	6	28
3	1 – 2,5 juta rupiah	1	5
4	Kurang dari 1 juta rupiah	-	-
5	Belum berpenghasilan	1	5

*Sumber : Hasil Analisis 2008*

kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya akan melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu hal ini juga akan membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.



Selanjutnya berkaitan dengan faktor usia, dari hasil perhitungan distribusi frekuensi usia responden diketahui bahwa 48 % dari jumlah responden berumur antara 41- 50 tahun. Dengan kata lain, jumlah responden yang berusia 41 – 50 tahun adalah 10 orang. Kisaran pada usia tersebut merupakan usia matang. Dengan demikian hal ini menandakan bahwa ternyata senioritas memiliki pengaruh dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Karena golongan usia tersebut dianggap lebih berpengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat dan juga menetapkan keputusan.

Faktor pendidikan dianggap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar serta cepat tanggap terhadap inovasi dan perubahan. Dari hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tingkat pendidikan responden diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan sarjana strata 2. Jumlah tersebut mencapai 43 % dari jumlah total responden. Hal ini berarti terdapat 9 orang yang berpendidikan sarjana strata 2.

Secara akumulatif, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta sebagian besar memiliki tingkat pendidikan sarjana, yaitu 95 % atau sejumlah 20 orang dari 21 responden. Hanya satu orang responden saja atau 5 % yang berpendidikan SMP.

Dari hasil perhitungan frekuensi faktor pekerjaan seperti pada tabel IV.9 di atas, diketahui bahwa ada keseimbangan antara profesi guru/dosen dengan

wiraswasta. Kedua profesi tersebut mendominasi para responden, yaitu masing-masing 28,5 %. Jumlah tersebut berarti mencapai 6 orang dari total 21 responden.

Faktor jenis pekerjaan mampu mempengaruhi partisipasi pada hal-hal tertentu, karena berkaitan dengan derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang akan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan.

Faktor terakhir, yaitu faktor penghasilan, dari perhitungan distribusi frekuensinya, terlihat bahwa sebagian besar responden berpenghasilan lebih dari 5 juta, yaitu sejumlah 62 % atau 13 responden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden berpenghasilan menengah ke atas.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa dari hasil analisis sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 40-50 tahun, berpendidikan sarjana strata 2, memiliki pekerjaan sebagai guru/dosen dan wiraswasta dan berpenghasilan cukup tinggi.

#### **4.7 Analisis Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan**

Pada bab terdahulu telah dilakukan analisis tentang bentuk, tingkat dan

faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta.

Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya program sekolah nasional bertaraf internasional adalah program yang telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Demikian pula komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, termasuk pula komponen sarana prasarana pendidikan.

Sebelum SMA Negeri 1 Surakarta ditetapkan sebagai sekolah bertaraf internasional, sekolah ini telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah sebagai sekolah kategori mandiri. Meskipun sarana prasarana yang ada waktu itu sudah dapat dikatakan cukup baik, namun menjelang ditetapkannya sebagai sekolah bertaraf internasional sarana prasarana tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditentukan. Oleh karena itu maka diperlukan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Dari sinilah maka partisipasi dari komite sekolah sangat diperlukan. Langkah awal yang dilakukan oleh komite sekolah adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah dalam program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan tersebut, baik berupa pengembangan fisik maupun peningkatan kualitas. Kegiatan ini berarti telah sesuai dengan peran Komite Sekolah yang telah diuraikan dalam Bab II, yaitu sebagai *advisory agency*.

Komite sekolah berperan sebagai pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta

Setelah identifikasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Hal ini berarti sejalan dengan peran Komite Sekolah, yaitu sebagai *advisory agency*. Karena dengan menyusun RAPBS maka ia telah berperan dalam memberikan pertimbangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta.

Partisipasi dari Komite Sekolah tidak berhenti di situ saja. Setelah RAPBS ditetapkan maka tugas selanjutnya adalah melaksanakan program itu sendiri. Agar program tidak menyimpang dari tujuan maka harus tetap mengacu pada rencana yang telah ditentukan. Dengan demikian Komite Sekolah telah melaksanakan perannya sebagai *supporting agency*, yaitu sebagai badan pendukung baik dalam pemikiran dan tenaga serta dalam wujud finansial dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta ini.

Setelah program dilaksanakan maka kegiatan selanjutnya adalah memantau pelaksanaan program tersebut. Tugas ini dilaksanakan agar program tersebut benar-benar tidak menyimpang dari tujuan. Sehingga apabila pemantauan benar-benar dilaksanakan maka program tersebut akan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan oleh komite sekolah adalah mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Evaluasi dilakukan apabila dalam pelaksanaan program ternyata tidak sesuai dengan tujuan maka dapat dilakukan pembenahan dan penyempurnaan.

Dan kegiatan terakhir yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah adalah membuat laporan pertanggungjawaban. Dengan membuat laporan ini, maka akuntabilitas suatu program dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah tersebut di atas, membawa implikasi bahwa ia telah melaksanakan perannya sebagai *controlling agency* atau pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

**TABEL IV.14.**  
**TABEL KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**  
**SARANA PRASARANA PENDIDIKAN**  
**DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA**

NO.	KEGIATAN
1	Identifikasi kebutuhan prioritas sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan mutu
2	Identifikasi kebutuhan prioritas sarana prasarana pendidikan untuk pengembangan fisik
3	Penyusunan perencanaan RAPBS untuk peningkatan mutu
4	Penyusunan perencanaan RAPBS untuk pengembangan fisik
5	Melakukan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sekolah
6	Memantau pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sekolah
7	Mengevaluasi pelaksanaan program
8	Membuat laporan APBS

*Sumber :Hasil Analisis 2008*

Dari beberapa langkah kegiatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses partisipasi telah dilaksanakan oleh Komite Sekolah. Hal ini berarti sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Khadiyanto (2002:31) bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dapat dilihat pada Tabel IV.14.

#### **4.8 Rangkuman Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta**

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan guna mengupayakan tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan dalam rangka memfasilitasi program sekolah nasional bertaraf internasional. Program tersebut memang telah diatur dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, namun untuk dapat melaksanakan program tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Komite Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta ternyata telah melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga telah melaksanakan partisipasinya dalam program tersebut.

Satu hal yang penting digarisbawahi dalam kaitannya dengan partisipasi adalah bahwa masyarakat diperlukan guna menjamin terciptanya akuntabilitas

dari suatu program. Karena dengan adanya akuntabilitas ini maka diharapkan dana-dana yang masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta dapat diawasi penggunaannya. Sehingga akan terhindar terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dana tersebut akan dapat berguna secara maksimal. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan juga akan memunculkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat terhadap sekolah ini. Dengan adanya rasa memiliki tersebut maka pada gilirannya akan memunculkan partisipasi aktif dari Komite Sekolah. Sehingga keberlangsungan sekolah ini sebagai sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat akan selalu terjaga.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data di lapangan yang dikumpulkan selama penelitian serta berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai evaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Program-program yang dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta dari tahun 2005 – 2007 nampak sekali adanya perbedaan dalam kegiatannya. Pada tahun 2005 SMA Negeri 1 Surakarta melaksanakan enam program. Dari keenam program tersebut diketahui bahwa belum ada program yang mengarah pada persiapan SNBI. Hal ini karena pada tahun tersebut SMA Negeri 1 Surakarta belum dinyatakan sebagai sekolah bertaraf internasional. Adapun dari program-program tahun 2006, terlihat bahwa dari keenam program yang dilaksanakan semuanya bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan SNBI. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut SMA Negeri 1 Surakarta telah ditunjuk sebagai sekolah bertaraf internasional. Adapun program tahun 2007, yang terdiri dari enam program, dapat dikatakan bahwa ada sebagian program yang ditujukan untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan sekolah bertaraf internasional dan melengkapi program tahun sebelumnya.



2. Sebagai sekolah bertaraf Internasional, maka guna pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar internasional. Dari hasil analisis diketahui bahwa ternyata sarana prasarana tersebut dapat dikatakan cukup siap dalam mendukung program sekolah bertaraf internasional karena ada beberapa komponen yang telah mengikuti standar yang telah ditentukan.
3. Tanggung jawab dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan bukanlah semata-mata tugas pemerintah semata. Masyarakat merasa perlu untuk berpartisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat cukuplah beragam. Pada tahap awal kegiatan masyarakat berpartisipasi dengan menyumbang usulan/gagasan. Bentuk ini adalah cara yang termudah dibanding bentuk-bentuk lain, seperti menyumbang uang, menyumbang tenaga ataupun menyumbang barang. Namun demikian, dengan menyumbang usulan berarti merupakan wujud dari adanya rasa untuk ikut bertanggung jawab dalam program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, karena sebagian besar responden berpendidikan Sarjana Strata 2, maka hal ini berpengaruh terhadap responden dalam mengemukakan pendapat.  
Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa masyarakat bukan saja sebagai pelengkap sekolah namun sudah merasa menjadi *partner* dari baik sekolah maupun pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Karena untuk mewujudkan program ini, masyarakat bekerja bersama-sama dengan sekolah melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dapat dijelaskan dalam empat variabel, yaitu frekuensi kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar. Dalam tingkat frekuensi kehadiran diketahui bahwa sebagian besar masyarakat hadir dan menyampaikan pendapat, namun masyarakat merasa bahwa pendapat tersebut tidak diperhitungkan. Karena menurut mereka pengambil keputusan ada pada pemegang kekuasaan. Namun apabila dirata-rata maka tingkat partisipasi pada frekuensi kehadiran ini, bila mengacu pada tipologi tangga partisipasi Arnstein termasuk dalam tingkat *placation*, yaitu masyarakat memang hadir dalam pertemuan dan berkesempatan menyampaikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa mata pencaharian seseorang berpengaruh terhadap waktu luang seseorang yang dapat digunakan untuk berpartisipasi misalnya menghadiri pertemuan.

Dalam tingkat partisipasi masyarakat pada keaktifan berdiskusi dan mengemukakan pendapat diketahui bahwa rata-rata maka tingkat keaktifan berdiskusi dan menyampaikan pendapat ini termasuk dalam tingkat *partnership*, yaitu masyarakat aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik diketahui bahwa tingkat ini tergolong dalam tingkat *placation*. Pada tingkat ini masyarakat terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide namun hanya sedikit ide yang

diperhitungkan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan membayar termasuk dalam tingkat *placation*, dimana masyarakat bersedia membayar dan menyampaikan ide pemanfaatannya, namun ide tersebut hanya sedikit yang dipertimbangkan. Masyarakat memang bersedia membayar karena diketahui bahwa sebagian besar responden berpenghasilan cukup tinggi. Seperti diketahui bahwa besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dapat digolongkan ke dalam tingkat *placation*. Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki pengaruh, namun keputusan ada pada pemegang kekuasaan. Hal ini disebabkan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta, terutama program tahun 2006 bertujuan untuk mempercepat tercapainya SMA Negeri sebagai sekolah bertaraf internasional. Sementara itu, program SNBI adalah program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur SNBI merupakan wewenang pemerintah pusat. Komite Sekolah hanya berwenang untuk melaksanakan program yang telah diatur tersebut. Selain itu, karena sebagian besar responden berpendidikan Sarjana Strata dua, maka dapat diasumsikan bahwa pendidikan memberi pengaruh kepada masyarakat dalam berpartisipasi.

4. Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Ia sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Karena merupakan alat pendukung, maka sarana prasarana merupakan kebutuhan yang terus berubah mengikuti kebutuhan sekolah. Untuk itu, maka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sangatlah diperlukan. Program-program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta dari tahun 2005 – 2007 nampak sekali adanya perbedaan dalam kegiatannya. Hal ini dikarenakan program tahun 2006 dilaksanakan dalam rangka mengejar persiapan pelaksanaan SNBI. Seperti diketahui bahwa Departemen Pendidikan Nasional (Pemerintah Pusat) menunjuk SMA Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah bertaraf internasional, oleh karena itu, konsekuensinya adalah Departemen Pendidikan Nasional (Pemerintah Pusat) berupaya untuk segera merealisasikan program tersebut dengan cara memberikan bantuan dana, sehingga program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta pada tahun 2006 sebagian besar bersumber dana dari Pemerintah Pusat.
5. Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan guna mengupayakan tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan dalam rangka memfasilitasi program sekolah nasional bertaraf internasional. Program tersebut memang telah diatur dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, namun untuk dapat melaksanakan program tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Komite

Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta ternyata telah melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga telah melaksanakan partisipasinya dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah Sarjana Strata dua. Seperti diuraikan di bab sebelumnya, pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.

## **5.2. Rekomendasi**

Setelah dilakukan analisis, maka rekomendasi yang perlu disampaikan kepada SMA Negeri 1 Surakarta berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Seiring dengan dilaksanakannya program sekolah bertaraf internasional, maka sarana prasarana yang ada di sekolah perlu dioptimalkan karena ada beberapa komponen yang belum mengikuti standar yang ditentukan. Optimalisasi dapat dilakukan dengan cara membuka sumber-sumber dana baru, misalnya melibatkan organisasi alumni.
2. Guna mempercepat tercapainya optimalisasi sarana prasarana pendidikan maka partisipasi sekolah yang saat ini sudah diwadahi ke dalam Komite Sekolah perlu ditingkatkan lagi perannya. Peningkatan peran dapat dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan dan mengingatkan anggota-

anggota yang jarang hadir dalam pertemuan untuk dapat berperan aktif dalam Komite Sekolah.

3. Pada dasarnya bentuk partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sudah dapat dikatakan cukup baik. Namun kiranya perlu dipertegas lagi bahwasanya tanggung jawab program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan juga ada pada masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk. Dengan memberikan sosialisasi aktif tentang program-program sekolah maka diharapkan Komite Sekolah tidak akan merasa ditinggalkan.
4. Pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1 Surakarta sudah dapat dikatakan cukup baik. Karena terlihat adanya partisipasi aktif dari Komite Sekolah. Namun ternyata masih ada dominasi pemegang kekuasaan. Dengan kondisi demikian, dikhawatirkan Komite Sekolah akan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Kepala Sekolah harus mampu mewedahi aspirasi masyarakat tersebut dengan cara melibatkan mereka secara penuh pada kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan program dari pemerintah. Dengan demikian, Komite Sekolah akan merasa bahwa mereka benar-benar dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, karena mereka dilibatkan dari awal pengidentifikasian masalah, pembuatan program kerja hingga pelaksanaannya. Maka rasa memiliki dari Komite terhadap sekolah ini akan tertanam pada diri mereka yang pada gilirannya akan memancing mereka untuk membuat ide-ide inovatif

guna keberlangsungan sekolah ini menjadi sekolah yang tetap dianggap favorit oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- . 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- . 2002. *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- . 2005. *Kota Surakarta dalam Angka*. Surakarta. Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta.
- . 2006. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.
- Abu-Duhou, Ibtisam. 2002. *School Based Management*. Terjemahan Noriamin Aini Suparto. Jakarta. Penerbit: PT Logos Wacana Ilmu.
- Anonim. 2008. "Wajah Baru di LPMP Jawa Barat". <http://www.lpmjabar.go.id>.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Penerbit: PT. Rineka Karya.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Penerbit: PT Rineka Cipta.
- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969.
- Gunawan, Ary H. 1996. *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.
- Hadi Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta. Penerbit: Andi
- Hardiati, Endang Sri. 2006. "Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Kebersihan dan Keteduhan Kota Pati". Tugas Akhir tidak diterbitkan,



Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik  
Universitas Diponegoro, Semarang.

Keputusan Menteri No. 044/U/2002 *tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*

Khadiyanto, Parfi, 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Semarang. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Konkon dan Suryatna. 1978. *Sejarah Azas-Azas dan Teori-Teori Pengembangan Sosial*. Bandung. Penerbit: LP3s IKIP Bandung.

Lazaruth, Soewadji. 1984. *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*. Yogyakarta. Penerbit: Kanisius.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohamad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Ghalia Indonesia.

Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta. Penerbit: PT Grasindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Pidarta, Made. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta. Penerbit: PT Bina Aksara.

Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: Gunung Agung.

Purwanto, Ngilim. 1987. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.

Sagala, Syaiful. 2006. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung. Penerbit: Alfabeto.

- Samtono. 2006. "SNBI Manajemen Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Nasional Bertaraf Internasional". <http://www.sma1-sltg.sch.id>.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Penerbit: Alumni.
- Sihono. 2003. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta". Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta. Penerbit: Sebelas Maret University Press.
- Slamet, 2005. "MBS, Life Skill, KBK, CTL dan Saling Keterkaitannya". *Pelangi Pendidikan*. Edisi III Desember 2005. hal 13 – 25.
- SMA Negeri 3 Semarang. 2006. "SNBI". <http://www.sman3-smg.sch.id>.
- Soekanto, Soerjono.1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta. Penerbit: Rajawali
- Suciati. 2006. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati". Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, et al. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*. Bandung. Penerbit: Refika Aditama.
- Sugiarto, et al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta. Penerbit: Gramedia.
- Suparlan, Y.B. 1990. *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta. Penerbit: Kanisius.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung. Penerbit: PT Grasindo.
- Talizuduhu, Ndaka. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta. Penerbit: Rineka Karya
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Masa Depan*. Bandung. Penerbit: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

- Wijaya, A.W. 1985. *Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Palembang. Penerbit: Presindo.
- Yulianty, Meitya. 2006. "Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta. Penerbit: Bigraf Publishing.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
JURUSAN PERENCANAAN PRASARANA PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

---

---

KUESIONER

---

---

- Kuesioner disusun dalam rangka penelitian tentang Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta
- Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka menunjang tesis S2, sehingga jawaban kuesioner tidak lain hanyalah untuk tujuan akademis semata
- Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam memberikan jawaban secara jujur kami ucapkan terima kasih.

Untuk Kepala Sekolah

## DAFTAR PERTANYAAN

### Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar di antara beberapa pilihan jawaban dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk jawaban yang yang tidak tersedia dalam pilihan, tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.

#### A. DATA RESPONDEN

1. Berapakah usia Anda ?
  - a. 31 – 40 tahun
  - b. 41 – 50 tahun
  - c. Lebih dari 50 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir Anda ?
  - a. Sarjana S3
  - b. Sarjana S2
  - c. Sarjana S1
3. Berapakah pendapatan rata-rata Anda per bulan ?
  - a. Lebih dari 5 juta
  - b. 2,5 – 5 juta
  - c. 1 – 2,5 juta

#### B. BENTUK PARTISIPASI

1. Apabila di SMA Negeri 1 Surakarta akan melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, anda akan berpartisipasi dengan cara :
  - a. Menyumbang uang
  - b. Menyumbang barang
  - c. Menyumbang tenaga
  - d. Menyumbang usulan / gagasan
  - e. Bentuk lain, sebutkan .....
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, bentuk kegiatan partisipasi yang akan anda lakukan adalah :
  - a. Dikerjakan bersama-sama antara Sekolah dengan Komite Sekolah
  - b. Membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut
  - c. Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah
  - d. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa
  - e. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah
  - f. Lainnya, sebutkan .....

### C. TINGKAT PARTISIPASI

1. Apakah yang biasanya anda lakukan dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta?
  - a. Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - b. Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
  - c. Hadir dan mampu membuat keputusan
2. Dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, apakah yang biasanya anda lakukan dalam kegiatan diskusi ?
  - a. Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara

- b. Aktif dan memiliki kewenangan membuat keputusan
  - c. Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan
3. Bagaimanakah keterlibatan anda dalam kegiatan fisik yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
- a. Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama
  - b. Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan ide
  - c. Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar
4. Apabila dalam rangka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan disepakati untuk membayar sumbangan dana, apakah yang anda lakukan ?
- a. Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana
  - b. Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatan dana
  - c. Membayar dan mampu membuat keputusan dan mampu mengakses dana dari luar

## **WAWANCARA**

1. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Komite Sekolah dalam program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta?
2. Apakah dalam kegiatan tersebut agar Komite Sekolah mau terlibat harus diperintah atau didampingi ?
3. Apakah anda mengundang seluruh pengurus Komite Sekolah dalam perencanaan, persiapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan ?
4. Berapakah anggota Komite Sekolah yang tidak hadir ? Apakah alasan ketidakhadiran mereka ?

5. Bagaimanakah keterlibatan Komite Sekolah dalam kegiatan bersama atau membayar iuran ?
6. Berapakah jumlah pertemuan Komite Sekolah dalam satu bulan? Bagaimana penentuan waktu dan tempat pertemuannya ?
7. Bagaimanakah bentuk sumbangan yang diberikan komite sekolah dalam program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
8. Adakah rencana jangka panjang atas sarana prasarana yang ada di sekolah saat ini ?
9. Bagaimanakah perawatan sarana prasarana sekolah ? Siapakah yang bertanggung jawab ?

Untuk Wakil Kepala Sekolah dan Guru

### **DAFTAR PERTANYAAN**

#### **Petunjuk Pengisian**

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar di antara beberapa pilihan jawaban dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk jawaban yang yang tidak tersedia dalam pilihan, tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.

#### **A. DATA RESPONDEN**

1. Berapakah usia Anda ?
  - a. 31 – 40 tahun
  - b. 41 – 50 tahun
  - c. Lebih dari 50 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir Anda ?
  - a. Sarjana S3
  - b. Sarjana S2
  - c. Sarjana S1



3. Berapakah pendapatan rata-rata Anda per bulan ?
  - a. Lebih dari 5 juta
  - b. 2,5 – 5 juta
  - c. 1 – 2,5 juta

## B. BENTUK PARTISIPASI

1. Apabila di SMA Negeri 1 Surakarta akan melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, anda akan berpartisipasi dengan cara :
  - a. Menyumbang uang
  - b. Menyumbang barang
  - c. Menyumbang tenaga
  - d. Menyumbang usulan / gagasan
  - e. Bentuk lain, sebutkan .....
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, bentuk kegiatan partisipasi yang akan anda lakukan adalah :
  - a. Dikerjakan bersama-sama antara Sekolah dengan Komite Sekolah
  - b. Membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut
  - c. Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah
  - d. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa
  - e. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah
  - f. Lainnya, sebutkan .....

## C. TINGKAT PARTISIPASI

1. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta?
  - a. Hadir karena terpaksa

- b. Hadir sekedar memenuhi undangan
  - c. Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat
  - d. Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapat tidak diperhitungkan
  - e. Hadir dan memberikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan
  - f. Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - g. Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
  - h. Hadir dan mampu membuat keputusan
2. Dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, apakah yang biasanya anda lakukan dalam kegiatan diskusi ?
- a. Berdiskusi karena terpaksa
  - b. Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya
  - c. Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan berpendapat
  - d. Mendapat informasi dan boleh berpendapat tapi tidak diperhitungkan
  - e. Aktif, tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan
  - f. Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - g. Aktif dan memiliki kewenangan membuat keputusan
  - h. Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan
3. Bagaimanakah keterlibatan anda dalam kegiatan fisik yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
- a. Terlibat karena terpaksa
  - b. Terlibat sekedarnya saja
  - c. Terlibat tanpa mendapat kesempatan menyampaikan ide-ide
  - d. Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan
  - e. Terlibat tapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan
  - f. Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama
  - g. Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan ide

- h. Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar
4. Apabila dalam rangka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan disepakati untuk membayar sumbangan dana, apakah yang anda lakukan ?
- a. Membayar karena terpaksa dan tidak memperhatikan manfaatnya
  - b. Membayar sekedarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya
  - c. Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya
  - d. Membayar dan berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya tapi tidak diperhitungkan
  - e. Membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan
  - f. Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana
  - g. Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatan dana
  - h. Membayar dan mampu membuat keputusan dan mampu mengakses dana dari luar

## WAWANCARA

1. Adakah usaha untuk memotivasi siswa agar memaksimalkan pemakaian sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah ?
2. Bagaimanakah caranya untuk memotivasi siswa agar memaksimalkan pemakaian sarana prasarana pendidikan yang ada ?
3. Apakah sarana prasarana pendidikan di sekolah mampu mendorong siswa untuk berprestasi ?

Untuk Pengurus dan Anggota Komite Sekolah

### **DAFTAR PERTANYAAN**

#### **Petunjuk Pengisian**

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar di antara beberapa pilihan jawaban dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk jawaban yang yang tidak tersedia dalam pilihan, tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.

#### **A. DATA RESPONDEN**

1. Berapakah usia Anda ?
  - a. 21 – 30 tahun
  - b. 31 – 40 tahun
  - c. 41 – 50 tahun

- d. Lebih dari 50 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir Anda ?
- a. Sarjana S3
  - b. Sarjana S2
  - c. Sarjana S1
  - d. Sarjana Muda
  - e. Lulus SMA / sederajat
  - f. Lulus SMP / sederajat
3. Apakah pekerjaan Anda ?
- a. PNS/ABRI
  - b. Guru/Dosen
  - c. Dokter
  - d. Pensiunan
  - e. Pegawai Swasta
  - f. Wiraswasta
  - g. Siswa/mahasiswa
  - h. Lain-lain, sebutkan .....
4. Berapakah pendapatan rata-rata Anda per bulan ?
- a. Lebih dari 5 juta
  - b. 2,5 – 5 juta
  - c. 1 – 2,5 juta
  - d. Kurang dari 1 juta
  - e. Belum berpendapatan

## B. BENTUK PARTISIPASI

1. Apabila di SMA Negeri 1 Surakarta akan melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, anda akan berpartisipasi dengan cara :
- a. Menyumbang uang
  - b. Menyumbang barang

- c. Menyumbang tenaga
  - d. Menyumbang usulan / gagasan
  - e. Bentuk lain, sebutkan .....
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, bentuk kegiatan partisipasi yang akan anda lakukan adalah :
- a. Dikerjakan bersama-sama antara Sekolah dengan Komite Sekolah
  - b. Membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut
  - c. Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah
  - d. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa
  - e. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah
  - f. Lainnya, sebutkan .....

### C. TINGKAT PARTISIPASI RESPONDEN LAINNYA

1. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan

Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta?

- a. Hadir karena terpaksa
- b. Hadir sekedar memenuhi undangan
- c. Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat
- d. Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapat tidak diperhitungkan
- e. Hadir dan memberikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan
- f. Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
- g. Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
- h. Hadir dan mampu membuat keputusan

2. Dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, apakah yang biasanya anda lakukan dalam kegiatan diskusi ?
  - a. Berdiskusi karena terpaksa
  - b. Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya
  - c. Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan berpendapat
  - d. Mendapat informasi dan boleh berpendapat tapi tidak diperhitungkan
  - e. Aktif, tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan
  - f. Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - g. Aktif dan memiliki kewenangan membuat keputusan
  - h. Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan
3. Bagaimanakah keterlibatan anda dalam kegiatan fisik yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
  - a. Terlibat karena terpaksa
  - b. Terlibat sekedarnya saja
  - c. Terlibat tanpa mendapat kesempatan menyampaikan ide-ide
  - d. Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan
  - e. Terlibat tapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan
  - f. Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama
  - g. Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan ide
  - h. Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar
4. Apabila dalam rangka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan disepakati untuk membayar sumbangan dana, apakah yang anda lakukan ?
  - a. Membayar karena terpaksa
  - b. Membayar sekedarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya
  - c. Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya

- d. Membayar dan berkesempatan menyampaikan ide namun ide tersebut tidak diperhatikan
- e. Membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan
- f. Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana
- g. Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatan dana
- h. Membayar dan mampu membuat keputusan dan mampu mengakses dana dari luar

## **WAWANCARA**

### Untuk Ketua dan Wakil Ketua Komite Sekolah

1. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan Komite Sekolah dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta ?
2. Bagaimanakah pendanaannya ?
3. Apakah dalam kegiatan tersebut agar Komite Sekolah mau terlibat harus diperintah?
4. Apakah Bapak selalu memberi pengarahan dalam setiap kegiatan bersama yang dilaksanakan ?
5. Apakah keputusan Bapak selalu mendapat dukungan anggota Komite Sekolah?
6. Berapakah rata-rata pertemuan Komite Sekolah dalam satu bulan ?

### Untuk Pengurus lainnya dan Anggota Komite Sekolah

1. Apakah menurut anda program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan ? Mengapa ?
2. Apakah makna sarana prasarana pendidikan menurut Anda ?



3. Apakah menurut anda program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan perlu didukung ? Mengapa ?
4. SMA Negeri 1 Surakarta ditunjuk pemerintah sebagai SMA Bertaraf Internasional. Apakah menurut anda sarana prasarana pendidikannya sudah siap ?
5. Menurut anda apakah program Sekolah Nasional Bertaraf Internasional perlu didukung ? Mengapa ?
6. Bagaimana usaha yang anda lakukan dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?

#### Untuk Orang Tua Siswa

1. Apakah menurut anda program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan ? Mengapa ?
2. Menurut anda, siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
3. Apakah dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan anda merasa terbebani dalam pendanaan ?
4. Apabila sekolah akan mengadakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, apakah anda langsung setuju atau menawar ?
5. Pernahkan anda memberi masukan atau usulan secara aktif di luar pertemuan komite sekolah ?

#### Untuk Ketua OSIS

### **DAFTAR PERTANYAAN**

<b>Petujuk Pengisian</b>
--------------------------

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar di antara beberapa pilihan jawaban dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk jawaban yang yang tidak tersedia dalam pilihan, tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.

#### A. BENTUK PARTISIPASI

1. Apabila di SMA Negeri 1 Surakarta akan melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, anda akan berpartisipasi dengan cara :
  - a. Menyumbang uang
  - b. Menyumbang barang
  - c. Menyumbang tenaga
  - d. Menyumbang usulan / gagasan
  - e. Bentuk lain, sebutkan .....
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, bentuk kegiatan partisipasi yang akan anda lakukan adalah :
  - a. Dikerjakan bersama-sama antara Sekolah dengan Komite Sekolah
  - b. Membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut
  - c. Diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah
  - d. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa
  - e. Diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah
  - f. Lainnya, sebutkan .....

#### B. TINGKAT PARTISIPASI

1. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta?
  - a. Hadir karena terpaksa
  - b. Hadir sekedar memenuhi undangan
  - c. Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat
  - d. Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapat tidak diperhitungkan
  - e. Hadir dan memberikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan
  - f. Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - g. Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
  - h. Hadir dan mampu membuat keputusan
  
2. Dalam pertemuan Komite Sekolah berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, apakah yang biasanya anda lakukan dalam kegiatan diskusi ?
  - a. Berdiskusi karena terpaksa
  - b. Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya
  - c. Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan berpendapat
  - d. Mendapat informasi dan boleh berpendapat tapi tidak diperhitungkan
  - e. Aktif, tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan
  - f. Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara
  - g. Aktif dan memiliki kewenangan membuat keputusan
  - h. Aktif berdiskusi dan mampu mengambil keputusan
  
3. Bagaimanakah keterlibatan anda dalam kegiatan fisik yang berkaitan dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ?
  - a. Terlibat karena terpaksa
  - b. Terlibat sekedarnya saja
  - c. Terlibat tanpa mendapat kesempatan menyampaikan ide-ide

- d. Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan
  - e. Terlibat tapi hanya sedikit ide yang diperhitungkan
  - f. Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama
  - g. Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan ide
  - h. Terlibat dan mampu membuat keputusan serta mampu mengakses dana dari luar
4. Apabila dalam rangka program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan disepakati untuk membayar sumbangan dana, apakah yang anda lakukan ?
- a. Membayar karena terpaksa dan tidak memperhatikan manfaatnya
  - b. Membayar sekedarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya
  - c. Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya
  - d. Membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan
  - e. Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana
  - f. Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatan dana
  - g. Membayar dan mampu membuat keputusan dan mampu mengakses dana dari luar

## **WAWANCARA**

1. Apakah menurut anda program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan diperlukan ? Mengapa ?
2. Menurut anda apakah sarana prasarana pendidikan yang ada sudah cukup menunjang kegiatan belajar Anda ?
3. Bila belum, menurut anda bagaimanakah sarana prasarana pendidikan yang mestinya ada di SMA Negeri 1 Surakarta ini ?
4. Bila sudah, apakah sarana prasarana pendidikan yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal ?
5. Apakah ada usaha dari saudara agar sarana prasarana yang ada saat ini dapat bertahan lama (awet)? Bagaimana caranya ?
6. Apakah anda memotivasi teman untuk merawat sarana prasarana yang ada saat ini ? Bagaimana caranya ?
7. Apabila sarana prasarana yang ada rusak, apa yang anda lakukan ?

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Ummul Chusnah lahir di Surakarta, 21 April 1970 dan tinggal di Kronggahan I 07/04 Trihanggo Gamping Sleman DIY. Sehari-hari bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

Dari lahir hingga menginjak SMP, ia tinggal dan belajar di Kota Surakarta. Namun ketika melanjutkan ke SMP ia harus pindah ke Purwodadi dan belajar di SMP Negeri 1 Purwodadi karena mengikuti orang tuanya. Setelah menamatkan SMP, ia kembali ke Kota Surakarta dan melanjutkan di SMA Batik Surakarta hingga lulus dan menempuh studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta jurusan Sastra Inggris. Setamatnya dari sarjana, ia tidak langsung bekerja di Instansi Pemerintah namun selama beberapa tahun mengajar di beberapa SMA di Kota Surakarta hingga akhir tahun 1998 mengikuti Tes CPNS dan akhirnya pada tahun 1999 diterima sebagai staf di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta hingga sekarang. Pada tahun 1996, ia memperoleh informasi tentang beasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional lewat Beasiswa Unggulan. Hingga akhirnya pada tahun 2008 ia memperoleh gelar Magister Teknik dari Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Program Perencanaan Pendidikan.

Anak keempat dari 7 (tujuh) bersaudara ini, terlahir dari Ibu Ba'diyah dan ayah Sugeng Rosjidi (Alm). Pada tahun 1999 ia menemukan jodohnya dan menikah pada tahun itu juga dengan Muhamad Daim yang sehari-hari bekerja di RSUP Dr. Sardjito. Sekarang ia telah dikarunia tiga anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Mereka adalah Muhammad Abid Arrofi, Muhammad Qais Alqurny dan Muhammad Daffa Arrosyid.